

**PENGARUH REALISASI BELANJA DAERAH DAN UPAH  
MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI  
PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh:**

**RAHMA APRIANI**

**NPM. 1951010456**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Nurlaili,M.A.**

**Pembimbing II : Taufiqur Rahman,S.E.,M.Si.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul Pengaruh Belanja Daerah Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Guna memudahkan dan menghindari kesalah pahaman atau kekeliruan dalam memahami makna dari judul tersebut maka perlu penegasan serta memberikan penjelasan tentang pengertian judul skripsi ini. Adapun uraian secara singkat dari istilah-istilah yang terkandung sebagai berikut:

1. Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya.<sup>1</sup> Jadi dengan kata lain kedua variabel atau lebih akan menghasilkan suatu hal yang baru dan saling berhubungan.
2. Realisasi Adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan.<sup>2</sup>
3. Belanja Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah, semua pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana berjalan dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang daerah tidak mendapat imbalan pengembalian oleh daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiono, *Penelitian Administratif* (Bandung: Alfa Beta, 2007), 7.

<sup>2</sup> Inten Meiliana, Firman Menne, And Adil Setiawan, "Analisis Rencana Dan Realisasi Anggaran Belanja Operasional Dan Belanja Modal Pada Rsau Dr. Dody Sardjoto," *Economics Bosowa* 8, no. 002 (2022): 236–247.

<sup>3</sup> "Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah," 2006.

4. Upah Minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral.<sup>4</sup>
5. Pengangguran, menurut Sukirno Pengangguran sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang diinginkannya.<sup>5</sup>
6. Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan tentang suatu hal.<sup>6</sup>
7. Ekonomi Islam ialah ilmu ekonomi yang berlandaskan Al Quran dan Hadits. Para ulama khususnya ahlusunnah wal jamaah sepakat bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah tersebut, dapat di perjelas bahwa yang di maksud dalam judul ini ialah untuk mengetahui pengaruh realisasi belanja daerah dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran kemudian dikaitkan dengan ekonomi islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pengangguran menjadi salah satu masalah yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Salah satunya permasalahan ketenagakerjaan ialah ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Hal tersebut harus dituntaskan agar perekonomian Indonesia berkembang dan maju, Salah satu keberhasilan pembangunan adalah menurunnya tingkat pengangguran melalui pembukaan lapangan pekerjaan maupun membuka usaha baru, dengan menurunnya tingkat pengangguran maka akan menaikkan taraf kesejahteraan serta mengurangi tingkat kemiskinan.

---

<sup>4</sup> Fuad Ikhsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, cetakan ke. (jakarta: Raneka Cipta, 2003), 22.

<sup>5</sup> Sukirno Sadono, *Makro Ekonomi Modern* (jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2000), 272.

<sup>6</sup> Yusuf Qhardawai, *Fikih, Zakah, Muassasat Ar-Risalah, Cet II Bairut Libanon*, 1408H/1998 terjemahan Didin Hafifudin, 1.

<sup>7</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), 16.

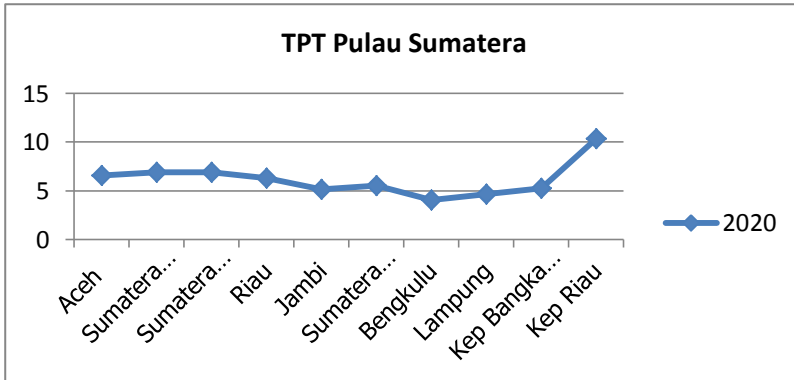
Sebagai negara berkembang negara Indonesia tidak lepas dari masalah pengangguran. Kompleksnya masalah pengangguran di Indonesia tak lepas dari banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia yang tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan kerja dan sektor usaha merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia. Salah satu faktor yang menentukan kemakmuran seseorang adalah tingkat pendapatan. Dengan adanya sebagian pengangguran maka akan mengurangi pendapatan yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka raih.

Dalam hal ini pengangguran banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya daerah Lampung dan kian meningkat pasca pandemi *Covid 19* yang melanda dunia awal tahun 2020 hingga sekarang. Terjadinya pengangguran di provinsi Lampung hal ini antara lain di sebabkan oleh terus meningkatnya jumlah tenaga kerja yang kian bertambah dari waktu ke waktu dengan kesempatan kerja yang tidak seimbang.<sup>8</sup> Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi urutan ke 9 dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera pada kurun waktu 2 tahun terakhir yakni pada tahun 2020, Kepulauan Riau masih menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi dengan persentase 10,34% walaupun demikian provinsi Lampung harus tetap waspada dengan kenaikan tingkat pengangguran ini. Berikut tabel tingkat pengangguran terbuka di pulau Sumatera pada tahun 2020:

---

<sup>8</sup> Siti Indayani and Budi Hartono, "Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19," *Jurnal Perspektif* 18, no. 2 (2020): 201–208.

**Gambar 1.1**  
**Garfik Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di**  
**Pulau Sumatera tahun 2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung 2020

Pada gambar 1.1 Perkembangan tingkat pengangguran provinsi-provinsi se Sumatera selama periode 2020 dimana pada tahun tersebut terjadinya peningkatan yang cukup signifikan secara rata-rata menunjukkan hasil yang beragam dan fluktuatif. Laju tingkat pengangguran tertinggi diperoleh Provinsi Kepulauan Riau yakni 10,34% diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 6,91%, dan Provinsi Aceh 6,59%. Sedangkan persentase tingkat pengangguran terendah diperoleh Provinsi Bengkulu sebesar 4,07% dan provinsi Lampung sebesar 4,67%.

Jika di lihat dari keadaan provinsi Lampung memiliki banyak keunggulan komparatif secara geostrategis, demografis dan sumber daya alam lainnya, Provinsi Lampung memiliki potensi yang cukup besar yaitu merupakan pintu atau gerbang utama kegiatan ekonomi antar wilayah di Pulau Jawa dan terletak di barat daya Sumatera dengan letak geografis yang menguntungkan. sebagai salah satu simpul distribusi barang dan jasa. Hal tersebut tentu menjadi peluang yang besar untuk daerah Provinsi Lampung menggali potensi sumber keuangan. Dengan adanya kemandirian fiskal ini

seharusnya dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang dapat menekan jumlah angka pengangguran di Provinsi Lampung. Dan apabila anggaran daerah direalisasikan secara tepat tentu dapat mengatasi masalah pengangguran di daerah tersebut. Namun hal ini belum sesuai dengan tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.

Berikut adalah tabel angka Tingkat Pengangguran terbuka yang ada di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2021.<sup>9</sup>

**Tabel 1.1**  
**Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**di Provinsi Lampung Tahun 2011-2021**

No	Tahun	TPT (%)
1	2011	6,38
2	2012	5,20
3	2013	5,69
4	2014	4,79
5	2015	5,14
6	2016	4,62
7	2017	4,33
8	2018	4,06
9	2019	4,03
10	2020	4,67
11	2021	4,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung 2011-2021

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut terlihat jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 11 tahun terakhir mengaami fluktuasi, Pada tahun pada tahun 2011 pada penelitian ini provinsi lampung memiliki tingkat pengangguran terbesar yakni 6,38% dan memperlihatkan penurunan sebesar 5,20% di tahun 2012 kemudian pada tahun

---

<sup>9</sup> BPS, "Provinsi Lampung Dalam Angka 2021," *BPS Provinsi Lampung* 2, no. 2 (2021).

2013 meningkat menjadi 5,69% dan meningkat kembali pada tahun 2013 sebesar 5,69%, dan pada tahun 2014 turun menjadi 4,79%. Pada tahun 2016 sampai tahun 2019 jumlah TPT menurun hal ini menimbulkan dampak baik bagi masyarakat provinsi Lampung karena dengan penurunan tingkat pengangguran berarti taraf kesejahteraan masyarakat dapat terukur, Tetapi pada tahun 2020 TPT kembali mengalami peningkatan sebesar 0,64% dari tahun sebelumnya yakni mencapai 4,67% dengan di susul pada tahun 2021 mengalami kenaikan 0,02% dan peningkatan meningkat lebih tinggi dari empat tahun sebelumnya yaitu tahun 2016-2020.

Menurut data tersebut tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung berfluktuasi pada tahun 2017 hingga Tahun 2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 TPT kembali meningkat sebesar 4,67% dan meningkat sebesar 0,64% dari tahun sebelumnya, salah satunya peningkatan TPT adalah adanya angkatan kerja baru dari orang-orang yang baru saja lulus SMA atau Perguruan Tinggi. Pada tahun 2020 - 2021 perusahaan umumnya tidak terserap akibat dampak pandemi covid-19. Selain itu, BPS Provinsi Lampung mencatat 39.862 orang yang kemudian menjadi pengangguran. Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebesar 6,8% di wilayah Lampung, TPT terendah sebesar 2,53% untuk penduduk berpendidikan SD ke bawah, dan TPT tertinggi sebesar 8,53% pada tingkat pendidikan SMA.<sup>10</sup> Dalam hal ini seharusnya pemerintah memperhatikan dan mengatasi permasalahan pengangguran di provinsi lampung. Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan semua orang secara merata. Pemerintah mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program pembangunan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran

---

<sup>10</sup> BPS Sumatra, "Berita Resmi Statistik," *Bps.Go.Id* 19, no. 27 (2020): 1-8.

dan kemiskinan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.<sup>11</sup>

Angka dengan tingkat pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik, Pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik, dan akan mencerminkan peningkatan kualitas hidup penduduk dan peningkatan distribusi pendapatan., Menurut Teori Lewis didukung oleh Ranis dan Fei yang menyatakan di negara berkembang terlalu banyak pekerja, banyak pengangguran, dan sumber daya alam yang tidak diolah dengan baik.<sup>12</sup> Secara umum, laju pertumbuhan angkatan kerja di negara berkembang lebih cepat dari pada laju pertumbuhan lapangan kerja. Untuk itu, negara berkembang harus meningkatkan upaya untuk mengurangi pengangguran Saat ini banyak pekerjaan manusia yang tergantikan oleh tenaga mesin, akibat peningkatan lowongan yang lebih rendah dari peningkatan angkatan kerja, banyak pekerja yang tidak mendapatkan pekerjaan..<sup>13</sup>

Menurut Keynes, campur tangan pemerintah diperlukan karena persoalan ini tidak bisa diserahkan pada sistem pasar bebas. Ketika jumlah pekerja bertambah, begitu juga upah, ini menjadi merugikan, bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti penurunan daya beli masyarakat terhadap barang. Pada akhirnya produsen akan merugi dan tidak mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu, peran penting pemerintah dalam urusan pembangunan sangat diperlukan, untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata bagi semua, pemerintah menetapkan kebijakan fiskal sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program pembangunan

---

<sup>11</sup> Hayat Abdullah, "Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital Dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 6, no. 2 (2014): 117–128.

<sup>12</sup> alghofari Farid, "Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007 Farid Alghofari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang," *Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007* (2007): 1–31.

<sup>13</sup> Durrutul Mahsunah, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur," *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 1, no. 3 (2013).



yang mendorong. pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan taraf hidup rakyat miskin

Salah satu kebijakan pemerintah dengan mengalihkan Pengelolaan Belanja Daerah secara baik dan juga perencanaan sedemikian rupa dengan melihat prioritas daerah maka akan dapat mengoptimalkan APBD. Serta kebutuhan daerah yang harus diperhatikan untuk memenuhi keinginan masyarakat setempat dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengurangi tingkat pengangguran, peran pemerintah sangat dibutuhkan.

Dengan Terwujudnya Kebijakan Fiskal dan pengeluaran pemerintah daerah diharapkan pemerintah daerah mampu mengatasi berbagai permasalahan perekonomian daerah, termasuk pengangguran. Diharapkan pemerintah daerah mengatur berbagai urusan pemerintahan mampu memberikan manfaat dalam pemerataan pembangunan melalui belanja daerah di provinsi Lampung.

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka diantaranya adalah belanja daerah karena dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser titik keseimbangan pendapatan, sehingga apabila semakin besar pengeluaran pemerintah, di harapkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat.<sup>14</sup> Berikut adalah tabel belanja daerah yang ada di provinsi Lampung tahun 2011-2021.

---

<sup>14</sup> Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik* (Deepublish, 2018), 24.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun**  
**Anggaran 2011-2021 (Rp)**

No	Tahun	Belanja Daerah (X1)
1	2011	2.566.078.806
2	2012	4.354.050.898
3	2013	3.884.534.953
4	2014	4.454.187.317
5	2015	4.781.202.049
6	2016	5.476.921.596
7	2017	5.497.354.014
8	2018	7.538.988.966
9	2019	7.058.713.899
10	2020	6.967.358.448
11	2021	7.098.372.686

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2011-2021

Pada tabel 1.2 di atas terlihat bahwa belanja daerah pada tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Belanja Daerah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2013 yaitu Rp 3.884.534.953 dan terus berluktuasi di tahun 2014-2019, Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 91.355.451 dari tahun sebelumnya di tahun 2019 hal ini tak lepas dari dampak pandemi covid 19 di karenakan tingkat pendapatan yang menurun maka belanja daerah ikut mengalami penurunan dan meningkat kembali Rp 7.098.372.689 pada tahun 2021.

Secara umum, belanja daerah memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Penyebab kenaikan belanja daerah biasanya terkait dengan penyesuaian perubahan nilai tukar rupiah, inflasi, penyesuaian faktor ekonomi makro, dan perubahan besaran cakupan pelayanan. Namun dengan paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu mengendalikan belanja daerah dengan melakukan efisiensi belanja dan penghematan

anggaran. Dengan demikian belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan rakyatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang dapat diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri untuk membiayai pengeluaran daerahnya. Dengan alokasi anggaran yang tinggi juga diharapkan mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran jika rencana pelaksanaan mencapai target yang dianggarkan.<sup>15</sup> Melalui belanja daerah diharapkan dapat terwujud secara adil dan merata serta dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah, seperti pada masa Rasulullah SAW..

Ada beberapa penyebab yang melatar belakangi angka pengangguran di Provinsi Lampung, diantaranya adalah faktor upah. Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja jika dilihat dari segi penawaran tenaga kerja. Biasanya tingkat produktivitas, kualitas dan waktu kerja para pekerja itu sendiri yang menentukan besaran upah yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Menurut peraturan pemerintah ketenagakerjaan dan migrasi no.7 tahun 2013 tentang upah minimum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang belum menikah dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan dan berlaku selama 1 (satu tahun) di berturut-turut. Perkembangan tingkat Upah Minimum Propinsi di Propinsi Lampung setiap tahun mengalami peningkatan, dengan kenaikan upah minimum setiap tahun maka kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan seimbang dengan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut meningkat.. Berikut adalah tabel upah minimum provinsi Lampung tahun 2011-2021.

---

<sup>15</sup>Ogujiuba K, *Capital Budget Implementation in Nigeria: Evidence from the 2012 Capital Budget*, (Contemporary Economic:2014), Vol. 8 No.2, Hal. 299-314.

**Tabel 1.3**  
**Upah Minimum Provinsi Lampung tahun 2011-2021 (Rp)**

No	Tahun	UMP (X2)
1	2011	855.000
2	2012	975.000
3	2013	1.150.000
4	2014	1.399.037
5	2015	1.581.000
6	2016	1.763.000
7	2017	1.908.447
8	2018	2.074.673
9	2019	2.241.270
10	2020	2.432.002
11	2021	2.432.002

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2011-2021

Tabel 1.3 menunjukan bahwa perkembangan upah minimum setiap tahun mengalami kenaikan, pada tahun 2017 upah minimum sebesar Rp.1.908.447.50 mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.432.001.57 dan pada tahun 2021 tetap mencapai Rp. 2.432.001.57. Upah mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang bekerja, jika tingkat upah ditetapkan lebih tinggi maka akan mempengaruhi kenaikan biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja sehingga menimbulkan tingkat pengangguran.

Pengangguran adalah orang yang tidak memiliki penghasilan, sehingga orang tersebut dapat dikategorikan atau disamakan dengan fakir miskin dan harus termasuk dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat dan berhak mendapatkan bantuan. Sehingga umat Islam yang memiliki kelebihan harta wajib membagi sebagian rizkinya untuk meringankan beban orang lain, bahkan Allah mengutuk orang kaya yang tidak mau membagi hartanya dengan memasukkannya

sebagai pendusta agama. orang lain sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, Islam mengutuk orang yang malas berusaha bekerja kecuali ada alasan yang syar'i. Islam menerima tiga kelompok yang boleh mengemis. Pertama, orang yang menanggung hutang orang lain sampai dia membayarnya. Kedua, orang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, hingga ia menjadi sangat penting. Ketiga, orang yang tertimpa kesulitan hidup, hingga mendapat dukungan hidup.<sup>16</sup>

Pada masa Rasulullah realisasi sudah diterapkan, Dalam konsep Islam, kebijakan fiskal memiliki arti yang sangat penting dan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan syariah, yaitu meningkatkan kemakmuran dan menjaga iman, kehidupan, kecerdasan, kekayaan, dan kepemilikan.<sup>17</sup>

Q.S Al-Hasyr Ayat 7 menjelaskan tentang keadilan dan terealisasinya seluruh harta kekayaan agar harta tersebut tidak berfokus pada golongan tertentu saja, yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ  
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا  
يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

<sup>16</sup> Jurnal Ekonomi Syariah, “Jurnal Ekonomi Syariah” 3, no. September (2018): 359–365.

<sup>17</sup> Mustafa Edwin Nasution, “Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam” (2017): 203.

*Artinya: "Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."(Q.S Al-Hasyr [59]: 7)<sup>18</sup>*

Pada ayat di atas menjelaskan kebijakan pemerintahan pada masa Nabi Muhammad SAW, dimana dana yang masuk dan keluar perlu diseimbangkan pada masa Nabi untuk mencapai pemerataan yang obyektif. Artinya semua pendapatan harus didistribusikan secara adil dan merata sehingga semua aset tersebut tidak dibagi dan dinikmati oleh kelompok tertentu. Begitu pula dengan kebijakan fiskal di era modern dimana sekarang diharapkan kekayaan melimpah dan dengan kebijakan fiskal ini seluruh masyarakat akan merasakan kekayaan yang berasal dari daerah itu.

Imam Ahmad meriwayatkan, Sufyan bin 'Amr dan Ma'mar memberitahu kami dari az-Zuhri, dari Malik bin Aus bin al-Hadatsan, dari 'Umar, ia berkata: "Harta Bani an-Nadhir termasuk yang telah Allah berikan kepada Rasul-Nya, dengan tidak ada usaha terlebih dahulu dari kaum Muslimin untuk mengerahkan kuda dan untanya. Oleh karena itu, harta rampasan itu hanya khusus untuk Rasulullah, beliau nafkahkan untuk keluarganya sebagai nafkah untuk satu tahun. Dan sisanya beliau manfaatkan untuk kuda-kuda perang dan persenjataan di jalan-Nya." Demikianlah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad di sini secara ringkas. Diriwayatkan juga oleh sekelompok ahli hadits dalam kitab

---

<sup>18</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya*, Q.S Al Hayr (24) :7

kitab mereka kecuali Ibnu Majah dari hadits Sufyan, dari 'Amr bin Dinar dari az-Zuhri.<sup>19</sup>

Dan pihak-pihak yang memperoleh bagian harta fai' seperti yang disebutkan di dalam ayat di atas merupakan pihak-pihak yang disebutkan pada seperlima ghanimah. Dan kami telah membahasnya pada penafsiran surat al-Anfaal sehingga tidak perlu diulangi lagi di sini. Segala puji hanya milik Allah.

### C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan dalam menyelesaikan masalah pengangguran di provinsi Lampung melalui Realisasi Belanja Daerah dan UMP maka peneliti mengidentifikasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan sehingga mengakibatkan peningkatan pengangguran.
2. Pentingnya peran pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan dalam merealisasikan belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat provinsi Lampung.
3. Pendapatan yang layak dapat diwujudkan melalui kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah yang dilihat dari kebutuhan hidup yang layak.

### D. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meninjau pengaruh realisasi belanja daerah dan ump terhadap tingkat pengangguran di provinsi Lampung. Melalui anggaran pengeluaran pemerintah daerah diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan daerah, yaitu pengangguran. Dimana variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pendapatan daerah yang meliputi: Belanja Daerah serta Upah Minimum Provinsi (UMP) yang merupakan variable *X (independen)* dan tingkat Pengangguran yang merupakan varibel *Y (dependen)*. Batasan penelitian ini yaitu

---

<sup>19</sup> Dr Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, ed. M yusuf Harun, jilid 9. (jakarta: pustaka imam As syafii, 2003), 448.

dengan melibatkan hanya berkaitan dengan variabel tingkat pengangguran terbuka, realisasi belanja daerah dan upah minimum provinsi Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap tingkat Pengangguran di provinsi Lampung?
2. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap tingkat Pengangguran di provinsi Lampung?
3. Apakah Belanja Daerah dan Upah Minimum berpengaruh terhadap tingkat Pengangguran di provinsi Lampung?
4. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap realisasi Belanja Daerah dan Upah Minimum terhadap Tingkat pengangguran di provinsi Lampung?

#### **F. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap tingkat Pengangguran di provinsi Lampung.
2. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi Lampung terhadap tingkat pengangguran.
3. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah dan Upah Minimum terhadap tingkat Pengangguran di provinsi Lampung.
4. Untuk menganalisis tinjauan Ekonomi Islam terhadap Realisasi Belanja Daerah dan Upah Minimum terhadap tingkat pengangguran di provinsi Lampung.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Secara teoritis



- a. Dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh realisasi belanja daerah dan ump terhadap tingkat pengangguran di provinsi Lampung tahun 2011-2021.
  - b. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur tentang pengangguran di Provinsi Lampung. Secara praktis.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Pemerintah  
Agar menjadi bahan dasar pertimbangan pemerintah provinsi Lampung untuk mengambil kebijakan dari realisasi belanja daerah dan ump dalam menurunkan angka pengangguran.
  - b. Bagi Peneliti  
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan menambah wawasan tentang permasalahan ekonomi di lingkungan sekitar.
  - c. Bagi Pembaca  
Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan debat sejenis. Penelitian ini untuk mengembangkan kemampuan di bidang penelitian dan menerapkan teori yang penulis terima di perkuliahan.

## H. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Berikut ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti Belanja Daerah Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran.

1. **Dita Dewi Kuntiarti (2018)** dengan penelitiannya berjudul “Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2010-2015” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, kenaikan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010-2015.<sup>20</sup> Persamaan penelitian

---

<sup>20</sup> Dita Dewi Kuntiarti, “Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2010-2015,” *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* 7, no. 1 (2018): 1–9.

ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita Dewi Kuntiarti adalah sama-sama menggunakan variabel upah minimum untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengangguran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita Dewi Kuntiarti adalah pada penelitiannya tidak menggunakan variabel Belanja Daerah dan tidak mencantumkan secara Perspektif Ekonomi Islam. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel belanja daerah dan Upah Minimum. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dita Dewi Kuntiarti menganalisis di Provinsi Banten.

2. **Yarlina Yacob Dan Maulidiah Firdayanti (2019)** dengan penelitiannya berjudul “Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Upah Minimum menunjukkan pengaruh yang signifikan dan berdampak positif terhadap pengangguran di kabupaten/kota provinsi kalimantan barat.<sup>21</sup> Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yarlina yacob dan Maulidiah Firdayanti adalah sama-sama menggunakan variabel upah minimum untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengangguran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yarlina Yacob dan Maulidiah Firdayanti adalah pada penelitiannya tidak menggunakan variabel Belanja Daerah dan tidak mencantumkan secara Perspektif Ekonomi Islam. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel belanja daerah dan upah minimum. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yarlina Yacob dan Maulidiah Firdayanti menganalisis di Provinsi Kalimantan Barat.

---

<sup>21</sup> Y M F Yacob and Maulidiah Firdayanti, “Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat,” *Prosiding SATIESP* (2019): 132–142.

**3. Mardiana, Theresia Militina, Anis Rachma Utary (2018)** dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Sektor Pendidikan dan Kesehatan serta Infrastruktur terhadap Tingkat Pengangguran serta tingkat Kemiskinan” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan infrastruktur berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Kalimantan Timur, dapat disimpulkan ada dampak dari peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan namun masih rendah dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan jumlah lulusan yang ada masih teridentifikasi sebagai pengangguran terbuka karena jumlah lapangan pekerjaan tidak bisa mengimbangi jumlah lulusan di Kalimantan Timur dan dapat disimpulkan jika anggaran infrastruktur naik maka pengangguran akan turun. Artinya Pengeluaran Pemerintah bidang infrastruktur sudah memberikan dampak secara langsung, namun masih rendah dalam penurunan pengangguran di Kalimantan Timur karena masih minimnya pembangunan infrastruktur. Karena pembangunan infrastruktur masih fokus dikota-kota besar.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana, Theresia Militina, Anis Rachma Utary adalah sama-sama menggunakan variabel pengeluaran pemerintah daerah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengangguran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana, Theresia Militina, Anis Rachma Utary adalah pada penelitian ini tidak menggunakan variabel dependen Kemiskinan . Pada penelitian ini menggunakan variabel Belanja Daerah da Upah Minimum

---

<sup>22</sup> Mardiana Mardiana, Theresia Militina, and Anis Rachma Utary, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Serta Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran Serta Tingkat Kemiskinan,” *Inovasi* 13, no. 1 (2018): 50–60.

dan penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana, Theresia Militina, Anis Rachma Utary di provinsi Kalimantan Timur.

- 4. Selly Nursafitri dan Ana Toni Roby Candra Yhuda (2020)** dengan penelitian berjudul “Instrumen Moneter Dan Belanja Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pengangguran Terbuka” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur, belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur, Variabel yang memiliki pengaruh paling besar dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka adalah variabel belanja daerah. Secara bersama-sama variabel inflasi, upah minimum, belanja daerah dan pinjaman perbankan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur.<sup>23</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Selly Nursafitri dan Ana Toni Roby Candra Yhuda adalah sama-sama menggunakan variabel upah minimum dan pengeluaran belanja daerah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengangguran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Selly Nursafitri dan Ana Toni Roby Candra Yhuda adalah pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Inflasi dan pinjaman perbankan. Pada penelitian ini menggunakan variabel Belanja Daerah dan Upah Minimum. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Selly Nursafitri dan Ana Toni Roby Candra Yhuda menganalisis Provinsi Jawa Timur dengan periode tahun 2013-2018.

---

<sup>23</sup> Selly Nursafitri and Ana Toni Roby Candra Yhuda, “Instrumen Moneter Dan Belanja Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pengangguran Terbuka,” *jurnal Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 2 (2020): 121–136.

**5. Effendyy dan Rully Sutansyah (2019)** dengan penelitian berjudul “Pengaruh Upah Minimum Terhadap pengurangan Pengangguran Terbuka Di Indonesia” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil pengolahan variabel upah minimum pekerja memiliki pengaruh terbesar terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Koefisien variabel upah minimum pekerja sebesar -2,934. Angka ini memiliki makna setiap kenaikan upah minimum pekerja satu persen akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2,934 persen dengan asumsi variabel yang lainnya bersifat konstan (*ceteris paribus*), upah minimum pekerja memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hasil regresi linier berganda menunjukkan upah minimum sebagai variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap penurunan tingkat pengangguran, hubungan variabel upah minimum dengan pengangguran bersifat positif, artinya apabila upah minimum meningkat maka pengangguran pun akan meningkat.<sup>24</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendyy dan Rully Sutansyah adalah sama-sama menggunakan variabel upah minimum untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengangguran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendyy dan Rully Sutansyah adalah pada penelitian ini tidak melakukan penelitian dengan menggunakan data seluruh wilayah Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan variabel Belanja Daerah dan Upah Minimum dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Effendyy dan Rully Sutansyah menggunakan variabel Inflasi, serta pertumbuhan ekonomi dan menganalisis Seluruh Provinsi di wilayah Indonesia dengan jumlah 33 provinsi periode tahun 2003-2018.

---

<sup>24</sup> Rully Sutansyah Effendyy, “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia,” *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 14, no. 1 (2019): 115–124.

- 6. Edwin Basmar dan Rachmat Sugeng (2020)** dengan penelitian berjudul “Respon Fluktuasi Tingkat Upah Terhadap Perubahan Tingkat Pengangguran Di Indonesia” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian tingkat upah terhadap respon tingkat pengangguran untuk jangka panjang menunjukkan hasil nilai regresi yang berpengaruh positif signifikan ditandai dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 dan Potensi pengangguran melalui tingkat upah untuk jangka pendek menunjukkan pengaruh positif signifikan dimana jika tingkat upah yang rendah akan memberikan pengaruh pada meningkatnya potensi pengangguran.<sup>25</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Edwin Basmar dan Rachmat Sugeng adalah sama-sama menggunakan variabel upah minimum untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengangguran. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah pada penelitian ini tidak melakukan penelitian dengan menggunakan data seluruh wilayah Indonesia Pada penelitian ini menggunakan variabel Belanja Daerah dan Upah Minimum. Dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung sedangkan penelitian yang dilakukan Edwin Basmar dan Rachmat Sugeng menganalisis Seluruh Provinsi di wilayah Indonesia dengan jumlah 33 provinsi periode tahun 2011-2016.
- 7. Linda Wulandari, M Cholid Mawardi Dan Junaidi (2017)** dengan penelitian berjudul “ Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kota Batu Tahun 2017-2020” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran di daerah secara parsial mempengaruhi

---

<sup>25</sup> Edwin Basmar and Rachmat Sugeng, “Respon Fluktuasi Tingkat Upah Terhadap Perubahan Tingkat Pengangguran Di Indonesia,” *Jurnal Mirai Management* 5, no. 3 (2020): 38–50.

tingkat pengangguran di Pemerintah Kota Batu.<sup>26</sup> Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Linda Wulandari, M Cholid Mawardi dan Junaidi adalah sama-sama menggunakan variabel Belanja Daerah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengangguran. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah perbedaan wilayah penelitian.

**8. Rizaldi Kaharudin, Anderson G. Kumenaung, AudieO. Niode (2019)** dengan penelitian berjudul “Pengaruh Pengeluaran pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Belanja Pemerintah berpengaruh Negatif terhadap Pengangguran. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi jumlah Pengangguran yaitu sebesar 0,31. Jika Belanja Pemerintah meningkat sebesar 1 % maka Pengangguran akan turun sebesar 0,31 % . Hal ini sesuai dengan teori bahwa apabila belanja pemerintah digunakan untuk alokasi belanja barang dan jasa maka akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru dan menekan jumlah pengangguran di daerah itu.

Pada kajian terdahulu berbeda dengan penulis yang meneliti pada rentan waktu 2011-2021 juga mencantumkan “perspektif ekonomi islam” dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang konvensional saja akan tetapi dilihat secara perspektif Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis.

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan melihat dan memahami pembahasan dalam skripsi ini secara keseluruhan, maka perlu dikemukakan sistem dan pedoman apa saja yang menjadi

---

<sup>26</sup> Linda Wulandari and M Cholid Mawardi, “Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kota Batu Tahun 2017-2020,” *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 11, no. 06 (2022).

kerangka dan pedoman penulisan skripsi ini. Berikut adalah penyajian laporan tugas skripsi ini dengan menggunakan sistem penulisan sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian depan berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto dan pengabdian, halaman pendahuluan, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, makna simbol, singkatan dan abstraksi.

### 2. Bagian Utama Skripsi

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

#### BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari :

1. Penegasan Judul
2. Latar Belakang Masalah
3. Identifikasi dan Batasan Masalah
4. Tujuan Penelitian
5. Manfaat Penelitian
6. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
7. Sistematika Penulisan.

#### BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis

Bab ini berisi Landasan teori yang berisi tentang:

##### A. Konsep Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran
2. Teori Pengangguran
3. Jenis-jenis Pengangguran
4. Macam-macam Pengangguran
5. Faktor-faktor Pengangguran
6. Pengangguran Menurut Perspektif Ekonomi Islam

##### B. Konsep Belanja Daerah

1. Belanja Daerah
2. Teori Belanja Daerah
3. Hubungan Belanja Daerah Dengan Pengangguran



#### 4. Realisasi Belanja Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

#### C. Konsep Upah Minimum

1. Teori Upah
2. Jenis-jenis Upah
3. Dasar Hukum Upah Minimum
4. Penetapan Upah Minimum
5. Hubungan Upah Minimum Dengan Pengangguran
6. Upah Minimum Dalam Perspektif Ekonomi Islam

#### D. Hubungan Antar Variabel

#### E. Kerangka Pemikiran

#### F. Hipotesis

### BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi :

#### A. Pendekatan Penelitian Dan Jenis Penelitian

#### B. Populasi dan Sampel

#### C. Teknik Pengumpulan Data

#### D. Definisi Operasional Variabel

#### E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan Pembahasan penelitian kuantitatif dan statistik. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam:

#### A. Gambaran Umum

1. Geografis Provinsi Lampung
2. Topografis Provinsi Lampung
3. Penduduk dan Ketenagakerjaan

#### B. Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik
  - a. Uji Normalitas
  - b. Uji Multikolinearitas
  - c. Uji Autokorelasi

- d. Uji Heteroskedastisitas
  - 2. Hasil Uji Hipotesis
  - 3. Hasil Analisis Linier Berganda
  - 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R_2$ )
- C. Pembahasan Hasil Penelitian

#### BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari semua penelitian yang telah dilakukan. Akhirnya dapat dinyatakan bahwa terdapat permasalahan dalam penelitian dan penyelesaian hasil penelitian yang merupakan analisis objektif. Walaupun ada jalan keluar dalam saran atau rekomendasi untuk mengatasi masalah dan kelemahan tersebut. Rekomendasi ini tidak terlepas dari ruang lingkup penelitian.

A. Simpulan

B. Saran

Bagian Akhir Skripsi

Bagian Akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar rujukan dan lampiran



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Pengangguran

##### 1. Pengertian Pengangguran

Pengangguran atau tunakarya dalam bahasa Inggris yaitu *unemployment*, sedangkan dalam bahasa Arab adalah *faragh* adalah istilah untuk orang yang sedang mencari kerja, tidak bekerja sama sekali, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha memperoleh pekerjaan yang layak.

Definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut.<sup>27</sup>

Selain definisi di atas masih banyak istilah arti definisi pengangguran menurut pendapat para ahli sebagai berikut:

- a. Sukirno mendefinisikan pengangguran sebagai seseorang yang sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, namun tidak dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>28</sup> Seseorang dianggap menganggur jika sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha dan tidak bekerja, mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, serta yang tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- b. Prihanto menyatakan masalah pengangguran terbuka akan berdampak pada merosotnya daya beli masyarakat, serta menurunnya produktivitas masyarakat

---

<sup>27</sup> Nuvi Wikhdatus Sa'adah and Putu Sardha Ardyan, "Analisis Pengaruh Upah Minimum Pekerja Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tingkat Pengangguran Di Surabaya," *Sumber* 175 (2012): 6–23.

<sup>28</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 204.

at. Selain itu meningkatnya pengangguran dapat mempengaruhi kondisi sosial dan politik yang serius, seperti meningkatnya kriminalitas dan gangguan terhadap stabilitas politik negara.<sup>29</sup>

- c. Mankiw mengatakan bahwa seseorang dikategorikan bekerja jika ia menghabiskan beberapa hari pada minggu sebelumnya untuk mengerjakan pekerjaan yang dibayar. Kemudian seseorang dianggap pengangguran jika ia berhenti bekerja sementara atau sedang mencari pekerjaan.<sup>30</sup>
- d. Menurut Mulyadi Tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dan jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur disini adalah aktif mencari pekerjaan. Sedang Pengangguran terbuka adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.<sup>31</sup>
- e. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerjaketapi yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaan menurut Todaro, Michael P, dan Smith.<sup>32</sup>  
Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari

---

<sup>29</sup> Purwaka Hari Prihanto, "Tren Dan Determinan Pengangguran Terdidik Di Provinsi Jambi.," *Jurnal Paradigma Ekonomika*, no. April (2012).

<sup>30</sup> Nicholas Gregory Mankiw et al., "Grundzüge Der Volkswirtschaftslehre" (2008).

<sup>31</sup> Subri Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 32.

<sup>32</sup> Michael Todaro, "Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga," *Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga* (2006), 307.

pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.<sup>33</sup> Menurut Sutomo dalam Citradewi & Margunani menyatakan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran adalah perlu dikembangkannya semangat berwirausaha sedini mungkin.<sup>34</sup>

. Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan:

- a. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*)  
 Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{JUMLAH TINGKAT PENGANGGURAN}}{\text{JUMLAH ANGKATAN KERJA}} \times 100\%$$

- b. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)
  - 1) Bekerja penuh (*employed*) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
  - 2) Setengah menganggur (*underemployed*) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

---

<sup>33</sup> Rahmat Imanto, Maya Panorama, and Rinol Sumantri, "Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 118–139.

<sup>34</sup> Adelina Citradewi and Margunani Margunani, "Pengaruh Kepribadian, Pendidikan Kewirausahaan, Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Aktivitas Berwirausaha Mahasiswa Universitas Negeri Semarang," *Economic Education Analysis Journal* 5, no. 2 (2016): 519.

## 2. Teori Pengangguran

Berikut beberapa teori yang menjelaskan Teori-teori Pengangguran di Indonesia:

### a) Teori Klasik

Teori Klasik ini menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena misalokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga.<sup>35</sup>

Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena misalokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga.<sup>36</sup>

### b) Teori Keynes

Berbeda dengan pandangan aliran klasik yang dipelopori oleh Adam Smith tersebut, John Maynard Keynes sebagaimana disebutkan dalam Sukirno, menganggap bahwa pemerintah memiliki peranan dalam mengurangi pengangguran karena kesempatan kerja penuh pada sistem pasar bebas jarang tercapai.<sup>37</sup> Hal ini dikarenakan adanya kekurangan permintaan

---

<sup>35</sup> gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (ygyakarta: kanisius, 2004), 32.

<sup>36</sup> Tohar, *Membuka Usaha Kecil* (jakarta: kanisius, 2000), 2.

<sup>37</sup> Sukirno Sadono, *Ekonomi Pembangunan* (jakarta: Bima Grafika, 2008),

agregat sehingga penawaran agregat menurun. Oleh karena itu, kebijakan fiskal pemerintah sangat penting untuk mengatasi masalah pengangguran.

Teori Keynes mengatakan bahwa masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

c) Teori Kependudukan dari Malthus

Teori Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Dalam dia punya esai yang orisinal, Malthus menyuguhkan idenya dalam bentuk yang cukup kaku. Dia mengatakan penduduk cenderung tumbuh secara “deret ukur” (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan cenderung tumbuh secara “deret hitung” (misalnya, dalam deret 1,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya). Dalam karyanya yang terbit



belakangan, Malthus menekankan lagi tesisnya, namun tidak sekaku semula, hanya saja dia berkata bahwa penduduk cenderung tumbuh secara tidak terbatas hingga mencapai bata persediaan makanan.

Dari kedua uraian tersebut Malthus menyimpulkan bahwa kuantitas manusia akan terjerumus ke dalam kemiskinan kelaparan. Dalam jangka panjang tidak ada kemajuann teknologi yang mampu mengalihkan keadaan karena kenaikan supply makanan terbatas sedangkan “pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu memproduksi makanan untung menjaga kelangsungan hidup manusia”.

Apabila ditelaah lebih dalam toeri Malthus ini yang menyatakan penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan, dalam hal ini menimbulkan manusia saling bersaing dalam menjamin kelangsungan hidupnya dengan cara mencari sumber makanan, dengan persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu lagi memperoleh bahan makanan. Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manussia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur.

a) Teori Sosiologi Ekonomi No-Marxian

Awal dari analisis Marx pada awal abad 20 tentang struktur dan proses ekonomi yang dapat dibayangkan sebagai sistem kapitalisme kompetitif. Industri kapitalis yang ada pada zaman itu tergolong masih kecil dan belum ada satupun yang memegang perekonomian dan mengendalikan pasar. Namun Marx yakin pada suatu saat apabila kapitalisme sudah

muncul dengan demikian pesatnya maka akan memunculkan kompetisi antar industri yang menjadi semakin pesat dan kemudian menghasilkan sistem monopoli dari industri yang paling kuat dalam persaingan tersebut.

Dengan munculnya monopoli modal ini maka akan ada satu perusahaan besar yang akan mengendalikan perusahaan-perusahaan lain dalam perekonomian kapitalis. Dalam pengembangan analisis Marx yang dianut oleh para penganut Marxian yang baru ini konsep

“kelas buruh” tidak mendeskripsikan sekelompok orang atau sekelompok pekerjaan tertentu, tetapi lebih merupakan pembelian dan penjualan tenaga kerja. Para tenaga kerja tidak mempunyai alat produksi sama sekali sehingga segolongan orang terpaksa menjual tenaga mereka kepada sebagian kecil orang yang mempunyai alat produksi.

### 3. Jenis-Jenis Pengangguran

Jika dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang aktif dalam mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya, maka Sadono Sukirno mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan cirinya, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) terbuka yaitu tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha

---

<sup>38</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

- b. Pengangguran terselubung (*Disguised Unemployment*) yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu, tetapi tidak mengurangi jumlah produksi.
- c. SetengahMenganggur (*Under Unemployment*) yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari tujuh jam sehari.
- d. Pengangguran Musiman (*Seasonal unemployment*) Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan. Di musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur, Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Disamping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.
- e. Pengangguran Tersembunyi (*Hidden Unemployment*) yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu, jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien.

Pengangguran berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok<sup>39</sup>:

a. Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari tenaga kerja tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Hal ini terjadi karena para pekerja meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya dan lebih baik dari sebelumnya.

b. Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah.

c. Pengangguran Struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

d. Pengangguran Teknologi

---

<sup>39</sup> Ibid.

Pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Apapun jenis pengangguran akan berdampak pada seluruh lini kehidupan manusia, baik bidang perekonomian, sosial-politik, budaya bahkan agama. Dampak negatif pengangguran terhadap sektor perekonomian adalah masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dapat dicapainya. Hal ini terjadi karena ketika ada pengangguran maka pendapatan riil masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensialnya sehingga tingkat kemakmurannya akan rendah pula.

#### **4. Macam-Macam Pengangguran**

Untuk melakukan pengelompokan terhadap jenis-jenis pengangguran, kita perlu memahami dimensi-dimensi berikut ini:<sup>40</sup>

- a. Waktu (banyak diantara mereka yang ingin bekerja lebih lama, misalnya jam kerja per hari, per minggu, pertahun).
- b. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan).
- c. Produktifitas (kurangnya produktifitas sering kali disebabkan oleh kurangnya sumber daya komplementer dalam melakukan pekerjaan).
- d. Meskipun hal-hal tersebut merupakan dimensi yang paling nyata bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan secara efektif namun beberapa factor lainnya seperti, motivasi, sikap dan hambatan-hambatan budaya juga turut diperhatikan.

---

<sup>40</sup> Lincolin Arsyad, "Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima," *Yogyakarta: Upp Stim Ykpn* (2010).

## 5. Faktor-faktor pengangguran

Pengangguran berhubungan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan investasi, sedangkan investasi didapat dari akumulasi tabungan, tabungan adalah sisa dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru.

### 1) Faktor-faktor Pengangguran

Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agrerat.<sup>41</sup>

#### a) Kebijakan Pemerintah Yang Tidak Tepat

Perekonomian dinegara berkembang pada umumnya di kategorikan kedalam dua sektor yaitu sektor subsistem dicirikan sebagai sektor lamban, tradisioanl,terbelakang dan memiliki pengangguran yang tidak kentara. Sector kedua yaitu sektor modern berupa pertambangan, perkebunan dan perindustrian. Pertumbuhan sector modern akan menyerap angkatan kerja dari sector tradisional sampai akhirnya tidak ada yang tersisah pada sector tradisional.

Namun kenyataannya negara berkembang tidak selalu bisa mengikuti perkembangan dan kemajuan industry. Penggunaan teknologi yang kurang tepat menyebabkan penyerapan tenaga kerja menjadi kecil. Dilain sisi kurangnya upaya pelatihan tenaga kerja menyebabkan langkanya angkatan kerja yang memiliki skill, dan memaksa para pengusaha untuk memilih proses mekanisme.

#### b) DistoryHarga Faktor Produksi

---

<sup>41</sup> Nuvi Wikhdatus Sa'adah and Putu Sardha Ardyan, "Analisis Pengaruh Upah Minimum Pekerja Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tingkat Pengangguran Di Surabaya," *Jurnal Ekonomi & Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* 1, no. 2 (2016): 129-146.

Upah yang berlaku untuk tenaga kerja yang tidak memiliki skill di sektor modern di Negara-negara berkembang seringkali melebihi tingkat upah keseimbangan pasar karena adanya kebijakan upah minimum dari pemerintah, tekanan serikat kerja, dan perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut. Studi menunjukkan bahwa tingkat upah minimum yang tinggi menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Selain upah faktor yang mempengaruhi pengangguran adalah rendahnya biaya modal dan pengangguran penduduk berpendidikan tinggi. Lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kurikulum, kelulusan dari pendidikan tinggi ini lebih suka memilih pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya dan menolak untuk bekerja dibidang lain apalagi dengan tingkat upah dibawah standard.<sup>42</sup>

Menurut Todaro dan Smith pengangguran di negara-negara sedang berkembang pada umumnya didominasi oleh pengangguran usia muda dan pengangguran berpendidikan. Hal ini dikarenakan adanya revolusi pendidikan yang menyebabkan seseorang tanpa memikirkan kualitas dan hanya memikirkan kuantitasnya saja. Karena adanya peningkatan kebijakan pendidikan, sehingga hal inilah yang membuat banyak terjadinya pengangguran tenaga kerja terdidik di kota-kota besar sampai saat ini.<sup>43</sup>

## 2) Dampak Pengangguran

Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek dimana dua aspek tersebut yaitu:<sup>44</sup>

### a) Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

---

<sup>42</sup> Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* (jakarta: penerbit erlangga, 2004), 32.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi*, edisi keti. (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 32.

Pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit, serta pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan oleh keuntungan kelesuan kegiatan perusahaan yang rendah menyebabkan berkurangnya keinginan untuk melakukan investasi.

b) Akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran yaitu pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan dan pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek.

## **6. Peran Pemerintah Terhadap Pengangguran**

Secara teoritis, permasalahan pengangguran pada awalnya diangkat oleh Adam Smith, ahli ekonomi aliran klasik yang tidak menyetujui campur tangan pemerintah yang aktif untuk mengatur kegiatan perekonomian. Saat pengangguran meningkat, ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa peran pemerintah tidak diperlukan karena melalui mekanisme pasar bebas masalah pengangguran akan teratasi dan kesempatan kerja penuh pada akhirnya dapat tercapai kembali. Berbeda dengan pandangan aliran klasik yang dipelopori oleh Adam Smith tersebut, John Maynard Keynes sebagaimana



disebutkan dalam Sukirno, menganggap bahwa pemerintah memiliki peranan dalam mengurangi pengangguran karena kesempatan kerja penuh pada sistem pasar bebas jarang tercapai. Hal ini dikarenakan adanya kekurangan permintaan agregat sehingga penawaran agregat menurun.<sup>45</sup>

Dalam pemerintahan ada ketidakseimbangan fiskal (*fiscal imbalance*) merupakan fenomena yang muncul ketika terjadi ketidakseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran penting pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketidak seimbangan fiskal tersebut. Peran penting pemerintah salah satunya yaitu melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal sangatlah penting dalam mengatasi ketidak seimbangan fiskal yang berdampak pada masalah perekonomian termasuk masalah pengangguran.

Melalui kebijakan fiskal ini pemerintah pusat memberi wewenang kepada masing-masing daerah untuk mengatur atau mengelola keuangan daerah itu sendiri agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat di daerah masing-masing. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengatur belanja daerah yang tepat dapat membuat permintaan agregat meningkat sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang.<sup>46</sup>

Pengangguran merupakan permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah agar seluruh masyarakat dapat sejahtera.<sup>47</sup> Ada beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek dimana dua aspek tersebut yaitu:

- 1) Pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.
- 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan

---

<sup>45</sup> Pengangguran Di and Wilayah Sumatera, "Indonesian Treasury Review" (2016): 85–100.

<sup>46</sup> Budi Mulyana, *Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Iskal Dan Pengelolaan APBD Di Indonesia* (jakarta: LPKPAP, 2006), H 69.

<sup>47</sup> Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi* (Sinar Grafika, 2022).

ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit.

- 3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan oleh keuntungan kelesuan kegiatan perusahaan yang rendah menyebabkan berkurangnya keinginan untuk melakukan investasi.

Dari permasalahan diatas dapat dilihat bahwa pengangguran merupakan salah satu penyebab pendapatan pajak pemerintah berkurang dan kemudian berdampak pada perekonomian. Ada beberapa sudut pandang tentang peran penting pemerintah untuk mengatasi pengangguran.

Apapun jenis pengangguran akan berdampak pada seluruh lini kehidupan manusia, baik bidang perekonomian, sosial-politik, budaya bahkan agama.<sup>48</sup> Dampak negatif pengangguran terhadap sektor perekonomian adalah :

- a) Masyarakat tidak dapat memaksimumkan tingkat kemakmuran yang dapat dicapainya. Hal ini terjadi karena ketika ada pengangguran maka pendapatan riil masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensialnya sehingga tingkat kemakmurannya akan rendah pula. Kondisi seperti ini berdampak bertambahnya jumlah penduduk miskin.
- b) Pendapatan nasional dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian pajak yang harus diterima dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana

---

<sup>48</sup> Moh Subhan, "Pengangguran Dan Tawaran Solutif Dalam Perspektif Islam," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (2018).

untuk kegiatan ekonomi pemerintah pun akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.

- c) Tidak mampu menggalakkan pertumbuhan di sektor ekonomi. Adanya pengangguran berakibat signifikan terhadap kemampuan daya beli masyarakat, sehingga permintaan terhadap barang-barang produksi dan jasa akan berkurang. Kondisi seperti ini tidak merangsang kalangan investor untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian, tingkat investasi akan menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.

Dampak pengangguran terhadap bidang sosial adalah terjadinya kekacauan sosial dan politik, seperti munculnya penyakit-penyakit sosial (*patologi sosial*), dengan bertambahnya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen, perdagangan anak, tindak kriminal dan perilaku asusila, sehingga terkadang perilakunya mulai meresahkan warga. Sebab, kelompok seperti itu tidak segan-segan melakukan tindakan kriminal, demonstrasi yang dapat mengacaukan tatanan politik, bahkan mereka mengancam para korban atau bisa melukai atau membunuh apabila tidak diberi uang.

Menurut Sadono, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

## **7. Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Menurut pandangan Islam, menganggur bukanlah sesuatu yang dianjurkan dan masyarakat diharuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam rangka memenuhi

kebutuhan pokok masyarakat, harus ada sinergi peran antara individu, masyarakat maupun negara. Menurut Islam negara harus menetapkan suatu kebijakan strategi politik dan mekanisme yang harus dilaksanakan sebagai jaminan agar pemenuhan tersebut berjalan dengan baik. Di antara mewajibkan warganya untuk bekerja sebagaimana diwajibkan oleh Allah SWT. Menyediakan berbagai fasilitas dan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dan dapat memperoleh pekerjaan, Sebab hal tersebut menjadi tanggung jawab negara. Pengangguran bukanlah kodrat Ilahi yang tidak bisa dirubah. Pengangguran itu terjadi disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri. Allah SWT telah memberikan kekayaan alam yang melimpah dan akal yang tak ternilai harganya, hanya saja bagaimana manusia mempergunakan kedua anugerah tersebut dengan baik dan benar.

Meskipun dalam Islam terdapat ajaran saling berbagi rizki antara kelompok kaya dan miskin, tetapi Islam tidak menghendaki seseorang menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Oleh karena itu, Islam mengecam manusia yang malas berusaha dan bekerja kecuali jika terdapat alasan syar'i. Islam memberikan toleransi terhadap tiga golongan yang boleh meminta-minta. Pertama, seseorang yang menanggung hutang orang lain sampai ia melunasinya. Kedua, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Ketiga, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup, sampai mendapatkan sandaran hidup.<sup>49</sup>

Menurut Yusuf al-Qardawi, pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:<sup>50</sup>

#### 1. Pengangguran *jabariyah* (terpaksa)

Suatu pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak memilih status sehingga harus terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umunya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun, yang sebenarnya bisa

---

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Yusuf Al-Qardhawi, "Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Terj.," *Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual* 20051 (2005).

dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya, atau seseorang telah mempunyai skill tetapi skillnya tidak berguna sedikitpun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.

## 2. Pengangguran *khiyariyah*

Seseorang yang memilih untuk menganggur padahal pada dasarnya dia mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan. Dia memilih hancur dengan potensi yang dimiliki dibandingkan menggunakannya untuk bekerja. Dia tidak pernah berusaha dan mengusahakan suatu pekerjaan apapun, kepribadiannya malas hingga menjadi "sampah masyarakat"

Adanya pembagian kedua kelompok ini mempunyai kaitan erat dengan solusi yang menurut Islam untuk mengatasi suatu pengangguran. Kelompok pengangguran jabariyah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar mereka dapat bekerja. Sebaliknya, Islam tidak mengalokasikan dana dan bantuan untuk pengangguran khiyariyah karena pada prinsipnya mereka memang tidak memerlukan bantuan karena pada dasarnya mereka mampu untuk bekerja hanya saja mereka malas untuk memanfaatkan potensinya dan lebih memilih menjadi beban bagi orang lain.

Islam memandang bahwa akar masalah kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural yaitu:

- a. Kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya.
- b. kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
- c. kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil memakan harta anak yatim dan memakan harta riba.

- d. kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Hal ini tergambar dalam kisah Fir'aun, Haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat Mesir di masa hidup Nabi Musa.
- e. Kemiskinan timbul karena gejala eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin.

Sedangkan dampak lain pengangguran dari sisi agama adalah:

- a) Membahayakan terhadap akidah. Para penganggur harus selalu hati-hati atau waspada terhadap kondisinya. Hal ini disebabkan keadaannya yang serba kekurangan dapat menggodanya untuk melakukan kemaksiatan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam masyarakat, bisa saja terjadi seorang suami yang miskin melakukan perampokan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mengingat beratnya godaan-godaan yang dialami para penganggur, maka mereka harus pandai-pandai membentengi keimanannya dengan sabar dan syukur. Dengan sikap seperti ini orang-orang miskin akan bisa tangguh menghadapi godaan-godaan yang bisa menggoyahkan imannya.
- b) Membahayakan terhadap akhlak. Orang miskin lebih-lebih yang hidup di tengah-tengah orang kaya akan banyak mendorong mereka untuk berbuat yang tidak dibenarkan syara' dan akhlak mulia. Karena itu kita sering mendengar semboyan "rintihan perut lebih hebat dari rintihan hati nurani", dan lebih hebat lagi bila frustrasi dan kekacauan sudah tidak bisa dikuasai lagi akan timbul masa bodoh terhadap nilai-nilai etika dan kemantapan sendi-sendi yang pada gilirannya akan menjurus pada pengabaian nilai-nilai agama. Nabi pernah berpesan kepada para shahabat "Ambillah (terimalah) pemberian orang itu selama masih merupakan pemberian yang wajar. Tetapi apabila sudah menjadi suap guna

mengharap suatu pinjaman (utang), maka janganlah kamu terima dan kamu tidak bisa mneghindarinya, selama kamu diliputi oleh kebutuhan dan kemiskinan”.<sup>51</sup>

- c) Membahayakan terhadap kelangsungan rumah tangga. Pengangguran dapat mengancam keluarga dalam beberapa segi, baik segi pembinaan, kelangsungannya maupun pemeliharaannya. Dalam segi pembinaan menuju rumah tangga semisal seorang jejak yang ingin menikah, ia harus memikirkan bagaimana membayar mahar dan memberi nafkah, dengan ia pada posisi pengangguran ia mengalami kesulitan untuk mewujudkan impiannya menuju ke pelaminan. Oleh karenanya, al-Quran memerintahkan bagi para pemuda yang belum mampu menikah untuk memelihara kehormatan.
- d) Dalam segi pemeliharaan dan kelangsungan rumah tangga, pengangguran sering mendorong kepada hal-hal yang tidak baik antara suami istri, bahkan tidak jarang akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Karena ketidaksukaan istri kepada suami yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Dan kasus Islam pun mengakuinya, karena itu seorang hakim boleh menceraikan istri dengan suaminya. Jika disebabkan kesulitan dan ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istri dengan alasan menghilangkan kesulitan perempuan.

Islam sangat melarang untuk menganggur, larangan untuk menganggur karena hal ini dapat menyebabkan manusia berada pada zona kemiskinan sedangkan kemiskinan akan mendekatkan pada kekufuran. Termasuk lemahnya produktivitas merupakan sesuatu yang dibenci oleh Islam. Islam secara tegas memberikan dorongan kepada umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Lemahnya produktivitas akan menimbulkan berbagai masalah yang berimplikasi tidak hanya bagi kehidupan individu akan tetapi

---

<sup>51</sup> Yusuf Qardhawi, “Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan,” terj. Syahril Hakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) (1995).

juga kehidupan kelompok, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut Ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya bekerja.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ  
وَالْمُؤْمِنُونَ<sup>ط</sup> وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.(Q.S At-Taubah [9]:105).

Dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengerjakan suatu amal buruk dalam suatu saat dari usianya. Seandainya ia mati dalam keadaan mengamalkannya, niscaya ia masuk neraka. Tetapi keadaannya berubah, lalu ia mengamalkan amalan yang saleh. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya, maka Dia memberikan dorongan kepadanya untuk beramal sebelum matinya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya Allah memberikan dorongan untuk beramal kepadanya?"

Rasulullah Saw bersabda, "*Allah memberinya taufik (bimbingan) untuk melakukan amal saleh, kemudian Allah mencabut nyawanya dalam keadaan demikian.*" Hadis dengan melalui jalur ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara munfarid.

Perintah untuk bekerja banyak terdapat dalam al-Quran dan hadist salah satu ayat yang menjelaskan tentang etos kerja adalah Q.S. Al-Inshirah ayat 7:



## فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.(Q.S Al-Inshirah [94]:7).

Menurut ahli tafsir Al- Azhar apabila telah selesai suatu pekerjaan atau suatu rencana telah menjadi kenyataan; Fan-shab! Artinya bersiaplah buat memulai pekerjaan yang baru. Dengan kesadaran bahwa segala pekerjaan yang telah selesai atau yang akan engkau mulai lagi tidaklah terlepas daripada kesulitan, tapi dalam kesulitan itu kemudahan pun akan turut serta. Ada-ada saja nanti ilham yang akan diberikan Allah kepadamu, asal engkau senantiasa menyandarkan segala pekerjaanmu itu kepada Iman.<sup>52</sup>

Sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila kamu (Muhammad) telah selesai berdakwah Maka beribadatlh kepada Allah; apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia Maka kerjakanlah urusan akhirat dan ada lagi yang mengatakan: apabila telah selesai mengerjakan shalat berdoalah.<sup>53</sup>

Dan Allah memberikan penjelasan bahwa segala kesulitan pasti disertai dengan kemudahan. Hal itu merupakan motivasi sekaligus berita gembira untuk Nabi Muhammad saw, bahwa Allah akan merubah keadaan-keadaan sulit Nabi pada keadaan yang membahagiakan. Kelemahan menjadi kekuatan, umat yang semula memusuhi akan mencintai, dan kefakiran menjadi kekayaan. Ayat tersebut juga merupakan jawaban atas orang-orang kafir yang mengejek Nabi dengan kefakiran. Oleh karenanya, untuk mengatasi kefakiran tersebut ayat ini memotivasi umat

---

<sup>52</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, “Tafsir Al-Azhar,” *Singapore: Kerjaya Printing Industries* (2003).

<sup>53</sup> Ahmad Suja’i, “Prinsip-Prinsip Perencanaan Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11, no. 2 (2018): 161–180.

manusia untuk tidak mengenal lelah dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Setelah seseorang menyelesaikan sebuah pekerjaan, hendaklah kemudian ia susuli dengan melakukan pekerjaan yang lain, sehingga tidak ada waktu kosong tanpa aktivitas. Dengan kata lain tidak akan terjadi pengangguran.<sup>54</sup>

Dari sini, semakin jelas bahwa seseorang haruslah mempunyai semangat tinggi dalam hidup. Sebuah kebahagiaan, kekayaan, tidak akan diperoleh secara tiba-tiba dan seketika. Semua perlu kerja keras dalam mengisi hari untuk mendapatkannya, sehingga dengan selalu melakukan pekerjaan, baik yang bersifat duniawi atau *ukhrawi*, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia.

Dalam sebuah riwayat, Abd Allah bin *Mas'ud* pernah berkata bahwa ia benci melihat umat Islam yang menganggur, tidak melakukan suatu pekerjaan yang menyangkut kehidupan dunianya, tidak pula kehidupan akhiratnya.<sup>55</sup>

Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja.<sup>56</sup>

**Pertama**, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mencapai *pro-poor growth* melalui dua jalur utama: pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta.

**Kedua**, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (*pro-*

---

<sup>54</sup> Abd Basid, "Peningkatan Tarif Hidup Layak Melalui Produktivitas Bekerja Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 173–192.

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Sri Budi Cantika, "Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam," *Journal of Innovation in Business and Economics* 4, no. 2 (2013): 101–114.

*poor budgeting*). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai pro-poor budgeting yaitu: disiplin fiskal yang ketattata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik.

**Ketiga**, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Nabi Muhammad SAW membagikan tanah di Madinah kepada masyarakat untuk membangun perumahan, mendirikan pemandian umum di sudut kota, membangun pasar, memperluas jaringan jalan, dan memperhatikan jasa pos. penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai pro-poor budgeting yaitu: disiplin fiskal yang ketattata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik.

**Keempat**, Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public services*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Khalifah Usman tidak mengambil gaji dari kantornya.

**Kelima**, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (*pro-poor income distribution*). Terdapat tiga instrument utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak, dan wakaf. Islam mengatur bagi setiap

orang yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi milik-nya. Dan bagi siapa saja yang menelantarkan tanahnya, maka negara berhak mengambilnya untuk kemudian memberikan kepada orang lain yang siap mengolah nya.

Dengan penerapan zakat, maka tidak akan ada konsentrasi harta pada sekelompok masyarakat. Zakat juga memastikan bahwa setiap orang akan mendapat jaminan hidup minimum sehingga memiliki peluang untuk keluar dari kemiskinan. Lebih jauh lagi, untuk memastikan bahwa harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, Islam juga sangat mendorong orang kaya untuk memberikan qard, infak, dan wakaf.

## **B. Konsep Belanja Daerah**

Realisasi Anggaran dalam laporan belanja daerah merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah, maka itu analisis terhadap anggaran belanja daerah seharusnya dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi dan koreksi.<sup>57</sup>

### **1. Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

---

<sup>57</sup> Bonaraja Purba et al., *Ekonomi Pembangunan* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 58–59.

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Nurmalia Hasana dan Ahmad Fauzi Belanja di lingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia dapat diartikan sebagai keseluruhan pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 'Belanja Daerah,'" *Kementerian Keuangan* 51, no. 1 (2018): 212.

Komponen belanja daerah atau pengeluaran daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi

penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian). Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka sebagaimana diarahkan oleh Kementerian Keuangan RI pada tahun 2017, pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:<sup>59</sup>.

**Pertama**, memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarjinalisasi (*marginalized*),

terdevaluasi (*devalued*), dan mengalami keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*), sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan program kepala/wakil kepala daerah.

**Kedua**, meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program program penanggulangan kemiskinan.

**Ketiga**, mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan yang

---

<sup>59</sup> Herlina Kurniati and Yulistia Devi, "Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 2 (2022): 187–208.

mendukung pembangunan sektor pertanian, dan pencegahan terhadap bencana alam, serta sekaligus yang dapat memperluas lapangan kerja di pedesaan melalui pendekatan program padat karya.

**Keempat**, memberi alokasi anggaran belanja daerah pada sektor pembangunan pedesaan dalam bentuk pemberian bantuan operasional kepada perangkat desa.

**Kelima**, menyediakan bantuan dana bergulir bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka memberdayakan UMKM.

**Keenam**, meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja daerah dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.

**Ketujuh**, meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.<sup>60</sup>

#### 1) Belanja langsung

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung langsung mencakup:

##### a. Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

---

<sup>60</sup> “Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.” n.d.

Keuangan Daerah, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.<sup>61</sup>

Menurut Halim Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.<sup>62</sup> Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga asset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan pengadaan asset berkenaan.

Dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 bulan baik melalui pembelian maupun pembangunan.

Berikut klasifikasi Belanja Modal yang diatur dalam Dalam PSAP Nomor 02, belanja modal dapat dia ktegorikan ke dalam lima kategori utama, yaitu:

a) Belanja Modal Tanah

---

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>62</sup> Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat,2012), H.101.



Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, belanja modal adalah Seluruh pengeluaran untuk pengadaan pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan atau pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan atau dipakai.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Halim menjelaskan bahwa belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengertian dari belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (*kontraktual*).

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk

biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapasitas jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

e) Belanja Modal Lainnya

Belanja modal lainnya adalah Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat.

2) Belanja tidak langsung

Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja. Belanja tidak langsung mencakup:

a) Belanja pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus

PNS sebagai imbalan atas pekeljaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.<sup>63</sup>

Belanja pegawai meliputi:

- a. Gaji dan Tunjangan
  - b. Tambahan Penghasilan PNS
  - c. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD
  - d. Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- b) Belanja Bunga Utang

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.

- c) Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus meneru s.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ayat (1) Tahun 2006

<sup>64</sup> Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang *Mekanisme Pengelolaan Hibah*.

d) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa.<sup>65</sup>

e) Bantuan sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat.

f) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.

g) Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan tindakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.<sup>66</sup>

## 2. Teori Belanja Pemerintah

Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah

---

<sup>65</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang *Klasifikasi Anggaran*.

<sup>66</sup> *Ibid.*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ayat (1) Tahun 2006.

desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/ kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi. Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.<sup>67</sup>

Pengeluaran Pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Guritno, Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>68</sup> Teori mengenai pengeluaran pemerintah digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro:

a. Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah.<sup>69</sup> Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula

---

<sup>67</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah ‘Belanja Daerah.’”

<sup>68</sup> Mangkoesobroto Guritno, “Teori Ekonomi Makro,” *Yogyakarta: STIE* (1998).

<sup>69</sup> Harry A P Sitaniapessy, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Dan PAD,” *Jurnal Economia* 9, no. 1 (2013): 38–51.

pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut.

- 1) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- 2) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
- 3) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji meskipun secara administrasi keduanya berbeda.<sup>70</sup>

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model Rostow dan Musgrave tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, Model Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, serta teori Peacock dan Wiseman.

#### 1) Model Rostow dan Musgrave

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan

---

<sup>70</sup> Yulianti, *Akuntansi Sektor Publik Cetakan Kelima* (Jakarta: Salemba empat, 2008).

tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya

pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi peranan investasi swasta juga semakin besar. Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat

Musgrave dan Rostow mengatakan bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil.

## 2) Model Wagner

Menurut Wagner, terdapat tiga alasan pengeluaran pemerintah meningkat sejalan dengan peningkatan perekonomian.

**Pertama**, pemerintah mengeluarkan biaya untuk menjalankan fungsi administrasi dan perlindungan, di mana dengan pertambahan penduduk terjadi peningkatan pengeluaran untuk menjalankan fungsi tersebut.

**Kedua**, terdapat pengeluaran untuk budaya dan kesejahteraan (*cultural and welfare expenditures*), misalnya untuk pendidikan dan redistribusi pendapatan.

Pengeluaran ini mirip dengan barang mewah (*luxu*

*riou goods*) sehingga elastisitas pendapatannya lebih dari satu, yang berarti semakin tinggi pendapatan maka jumlah pengeluaran untuk jenis fungsi ini juga akan meningkat.

**Ketiga**, perkembangan teknologi dan kebutuhan modal yang sangat besar menyebabkan sektor-sektor tertentu cenderung bersifat monopoli, sehingga mendorong peran pemerintah untuk mengambil alih sektor usaha tersebut dalam rangka menghindari monopoli oleh swasta. Pengelolaan sektor usaha tersebut oleh pemerintah akan meningkatkan pengeluaran publik.<sup>71</sup>

Hukum Wagner menjelaskan hubungan jangka panjang antara ukuran pemerintah dengan kemajuan ekonomi, meskipun Wagner tidak memberikan rumusan matematisnya. Ukuran pemerintah umumnya diukur dengan jumlah pengeluaran, sedangkan perkembangan ekonomi umumnya dihitung dengan Produk Domestik Bruto (PDB).<sup>72</sup>

Wagner menerangkan mengapa peran pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Formulasi hukum Wagner sebagai berikut :

---

<sup>71</sup> Akhmad Solikin, "Pengeluaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis," *Info Artha* 2, no. 1 (2018): 65–89.

<sup>72</sup> Omar Mahmoud Abu-Eideh, "Causality between Public Expenditure and GDP Growth in Palestine: An Econometric Analysis of Wagner's Law," *Journal of Economics and Sustainable Development* 6, no. 2 (2015): 189–199.



$$\frac{PkPP1}{PPK1} < \frac{PKPP2}{PPK2} < \dots < \frac{PKPPn}{PPKn}$$

PkPP = Pengeluaran pemerintah per kapita

PPk = Pendapatan per kapita, yaitu GDP atau jumlah penduduk

1,2,...,n= jangka waktu (tahun)

### 3) Model Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman mengenai pengeluaran pemerintah sering disebut sebagai *The Displacement Effect*, karena teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak.

Dalam teori Peacock dan Wiseman, dinyatakan juga bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Peningkatan pada PDB dalam keadaan normal menyebabkan penerimaan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya

karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Salah satu cara agar dapat meningkatkan penerimaannya yaitu dengan menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*Displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.<sup>73</sup>

Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, teori ini merupakan dasar pada teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa pengeluaran dari waktu ke waktu semakin meningkat karena semakin bertambahnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan.<sup>74</sup>

#### b. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik dan faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik. Interaksi aturan permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan

---

<sup>73</sup> Guritno Mangkoesebroto, "Ekonomi Publik Edisi Ketiga,"  
Yogyakarta: BPFE (2008).

<sup>74</sup> Ibid.

menimbulkan permintaan akan barang lain.<sup>75</sup> Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor di bawah ini:

- 1) Perubahan permintaan akan barang publik.
- 2) Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- 3) Perubahan kualitas barang publik.
- 4) Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.

Adapun teori mikro dalam pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Penentuan Permintaan

$$U^i = f(G, X)$$

$G$  = vektr dari barang publik

$X$  = vektor barang swasta

$i$  = individu;  $= 1, \dots, m$

$U$  = fungsi utilitas

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constrain). Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi berikut:

- 2) Penentuan Tingkat Output

$$U_p = g(X, G, S)$$

$U_p$  = fungsi utilitas

$S$  = keuntungan yang di peroleh dalam bentuk materi atau kedudukan

$G$  = vektor barang swasta

$X$  = vektor barang jasa

---

<sup>75</sup> Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 143.

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih:

$$\text{Max } U_i = f(X, G)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya:

$$P \cdot X + t \cdot B < M_i$$

$P$  = vektor harga barang swasta

$X$  = vektor barang swasta

$B_i$  = basis pajak individu 1

$M_i$  = total pendapatan individu

$T$  = tarif pajak

Kurva permintaan dan pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses, yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (Price Taker). Atau asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang publik sehingga ia bertindak sebagai pegas output (Output Taker).<sup>76</sup>

### 3. Hubungan Belanja Daerah Dengan Pengangguran

Belanja daerah digunakan untuk penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat akan mendorong peningkatan aktivitas dari masyarakat. Apabila Peningkatan aktivitas tersebut diharapkan akan mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan memperbesar penerimaan daerah melalui sumber-sumbernya. Belanja daerah dilakukan oleh badan, kantor, lembaga dan dinas yang ada di daerah, Belanja daerah tersebut digunakan untuk belanja daerah yang bersifat wajib dan bersifat pilihan. Komponen belanja daerah atau pengeluaran daerah

---

<sup>76</sup> Sisanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.77-78.

merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik.<sup>77</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Febriana Nur Rahmawati dan Eti menyatakan hubungan erat antara pengangguran dan belanja daerah.<sup>78</sup> jadi ketika terjadi peningkatan dan penurunan pada belanja daerah akan memberikan dampak terhadap tingkat pengangguran terbuka Dan menunjukkan adanya hubungan antara belanja daerah dan pengangguran, Belanja daerah dapat menciptakan multiplier effect pada sektor-sektor perekonomian lain. Multiplier effect akan semakin besar jika belanja yang dilakukan untuk kegiatan produktif, Hal ini disebabkan ketika belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengalami kenaikan maka akan menstimulus kegiatan perekonomian dan mampu menciptakan multiplier effect yang kemudian akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut.<sup>79</sup> Mengalokasikan pengeluaran melalui belanja dan pembiayaan secara efektif dan efisien, serta mengoptimalkan dan mengelola anggarannya dengan baik, maka pembangunan di daerah dapat meningkat dan kondisi perekonomian yang stabil serta membuat pertumbuhan ekonomi semakin baik. Hal ini akan mendorong kenaikan permintaan agregat yang diikuti dengan kenaikan penawaran agregat, sehingga ada peningkatan kebutuhan tenaga kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja. Dengan kata lain, lapangan kerja bagi penduduk akan tercipta dan tingkat pengangguran dapat mengalami penurunan.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Isra Ul Huda And Anthonius J Karsudjono, "Belanja Daerah Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kota Banjarmasin," *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen* 8, No. 2 (2021): 50–77.

<sup>78</sup> Febriana Nur Rahmawati, "Analisis Pengaruh PDRB, UMK, Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik Di DI Yogyakarta (Tahun 2010-2015)" (2017).

<sup>79</sup> Nursafitri and Yudha, "Instrumen Moneter Dan Belanja Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pengangguran Terbuka."

<sup>80</sup> Moh Khusaini, *Keuangan Daerah* (Universitas Brawijaya Press, 2018).

#### 4. Realisasi Belanja Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kegiatan menambah pengeluaran negara mempunyai akibat tertentu yang pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda dengan kitab-kitab agama lain, kitab suci Al-Qur'an telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi kekayaan berimbang diantara berbagai lapisan masyarakat.

Dalam QS An Nisa ayat 58 menjelaskan tentang amanah yang diterima oleh para penguasa (pejabat) dalam menetapkan kebijakan untuk hajat orang banyak haruslah bersikap adil dan memberikan amanat kepada yang benar menerima haknya.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*” (QS An Nisa [9]:58).

Dalam hal ini islam berada pada posisi lebih utama dimana yang ingin diciptakan yaitu masyarakat yang sempurna dari semua aspek. Keadilan dilakukan dengan memberlakukan kebaikan bagi semua manusia dalam kondisi apapun. Tujuan distribusi anggaran dalam islam yaitu adanya kesempatan semua anggota masyarakat untuk memperoleh kecukupan bukan kekuarangan.

Menurut Muhammad Quraishihab, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt saat ini memberikan tuntunan yang sifatnya sangat ditekankan, karena ayat ini langsung menyebutkan Allah sebagai yang menuntun dan memerintahkan, sebagaimana terbaca dalam firman-Nya diatas: “*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat*” maksud menyampaikan amanat disini ialah menyampaikan amanat yang sempurna dan tepat waktu “*kepada pemiliknya*”, yakni yang berhak menerimanya, baik amanah Allah kepada kamu maupun amanah dari manusia, betapun banyaknya amanah yang di serahkan kepadamu, dan Allah juga menyuruh kamu “*apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*” sesuai apa yang telah diajarkan oleh Allah SWT, yaitu tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak juga menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau lawanmu dan tidak pula memihak walau temanmu.<sup>81</sup>

Dalam pondasi ekonomi Islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Secara ruang lingkup, peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar islami. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falah* yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahat bagi seluruh masyarakat. Kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan oleh salah satunya tanggung jawab terhadap perekonomian. Tugas pemerintah dalam perekonomian di antaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, dengan mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Al-Quran: Kisah Dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2008).

<sup>82</sup> Kurniati and Devi, “Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

Secara umum sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, *kharaj* (pajak pertanian), *jizyah* (pajak perorangan), *khums* (pajak harta rampasan perang), *usyur* (pajak perdagangan), warisan *kalalah* (orang yang tidak mempunyai ahli waris), *kaffarat* (denda), hibah dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal.

Di masa Nabi kebijakan anggaran masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Hal ini sebagian karena telah berubahnya keadaan sosio-ekonomik secara fundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yang didirikan jugadilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Negara yang menganut demokrasi, biasanya membuat anggaran belanja negara secara umum tiap tahun. Fakta anggaran belanja negara yang menganut demokrasi tersebut adalah bahwa anggaran belanjanya dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara sekian tahunan. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen. Di Indonesia misalnya, anggaran belanja negara tersebut dimuat dalam RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diajukan pemerintah kepada DPR untuk kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang APBN setiap tahunnya. Anggaran modern merupakan suatu campuran rumit antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan dimasa depan, maupun melenyapkan kesulitan dan rintanganyang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi negara.

Negara Islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan defisit anggaran. Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan dengan cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau dari luar negeri. Oleh karena itu, di dalam Islam tid



ak mengenal pembuatan anggaran belanjane negara tahunan seba gaimana yang terdapat dalam demokrasi, baik terkait dengan bab-babnya, pasal-pasal nya, maupun istilah-istilah dari pasal tersebut. Anggaran belanja dalam negara Islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara Islam mempunyai anggaran belanja tetap yang bab-babnya telah ditetapkan oleh syara“mengikuti pendapatan dan pengeluarannya.

Dapat diketahui bahwa selama masa Islam dini, penerimaan zakat dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Di zaman modern penerimaan ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan modern dalam suatu negara Islam. Diperlukan untuk mengenakan pajak baru, terutama pada orang yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. As-Sunnah dengan jelas menyatakan tentang hal ini: *“selalu ada yang harus dibayar selain zakat.”* Maka Rasulullah Saw. berpesan dan memerintahkan pengeluaran untuk kebajikan masyarakat. Sabdanya: *“kekayaan harus diambil dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin”*(HR. Bukhari). Setiap warga negara harus menyumbangkan keuangan negara sesuai dengan kemampuannya yaitu sesuai dengan pendapatnya. Menurut prinsip ekonomi, biaya pungutan pajak tidak boleh melebihi pendapatan dari pungutan pajak itu sendiri. Akan tetapi mengenai masalah zakat, pungutan zakat tidak memerlukan sistem organisasi yang lengkap yang membutuhkan biaya yang besar.

Pengeluaran pemerintah dalam koridor Negara Islam sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Maliki yang dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution, yaitu negara menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer perindividu secara menyeluruh, dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier nya sesuai kadar kemampuannya. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer ini meliputi: Pertama, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi

setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Kedua, jaminan kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan-kebutuhan kategori ini meliputi keamanan, kesehatan dan pendidikan.<sup>83</sup>

### C. Konsep Upah Minimum

Minimum Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.<sup>84</sup>

Upah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong semangat kerja dan produktivitas tenaga kerja, dimana hal ini akan menyebabkan output yang dihasilkan tenaga kerja menjadi lebih baik. Upah yang layak adalah upah yang memenuhi standar pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan mendapatkan upah yang layak maka tenaga kerja akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, mengenai upah minimum yang diatur dalam pasal 41 dan 42.

#### 1. Teori upah

##### 1) Teori Malhtus

Salah seorang tokoh mazhab klasik ini meninjau upah dalam kaitannya dengan perubahan penduduk. Jumlah penduduk merupakan faktor strategis yang di pakai untuk

---

<sup>83</sup> Mustafa Edwin Nasution, "Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam" (iain batu sangkar, 2017), 79.

<sup>84</sup> Bachtiar Surin, "Adz-Dzikraa Terjemah & Tafsir Al-Qur'an," *Bandung, Angkasa Bandung* (1991).

menjelaskan berbagai hal. Oleh karena itu, tingkat upah yang terjadi adalah karena hasil bekerjanya permintaan dan penawaran. Sudut pandang kaum klasik bertitik tolak dari sisi penawaran (supply side economies) yang akhir-akhir ini menjadi populer lagi. Tingkat upah sebagai harga penggunaan tenaga kerja, juga banyak ditentukan oleh penawaran tenaga kerja, seperti diutarakan di muka bahwa sumber utama penawaran tenaga kerja adalah penduduk, usia kerja yang sudah barang tentu bersumber dari penduduk. Bila penduduk bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah, maka hal ini menekan tingkat upah. Sebaliknya pun secara simetris tingkat upah akan menaik bila penduduk berkurang sehingga penawaran tenaga kerja pun berkurang. Oleh karena itu, dilihat dari sisi lain usaha menaikkan tingkat upah tidak akan ada faedahnya dalam jangka panjang sebab bila upah lebih tinggi dari semula, diperkirakan orang akan menjadi makmur sehingga ada kecenderungan untuk tidak ragu-ragu untuk mempunyai keluarga besar. Sebaliknya, bila ada usaha untuk menurunkan tingkat upah, maka kemakmuran akan berkurang. Penurunan kemampuan ekonomis ini akan mendorong orang untuk berhemat. Orang tidak mampu mempunyai keluarga besar dan memilih sedikit jumlah anak, berkurangnya jumlah penduduk akan mengangkat tingkat upah ke atas menuju ke tingkat semula. Jadi, dalam jangka panjang tingkat upah akan naik turun sesuai dengan perubahan jumlah penduduk dan akhirnya selalu kembali ke tingkat semula.

## 2) Teori Jhon Stuart Mills

Mills adalah seorang tokoh mazhab klasik yang pendapatannya dapat menyimpulkan bahwa tingkat upah juga tidak akan beranjak dari tingkat semula, namun dengan alasan yang berbeda. Menurutnya, dalam masyarakat tersedia dana upah (wage funds) untuk pembayaran upah. Dunia usaha menyediakan sebagian dari dananya yang diperuntukkan bagi pembayaran upah.

Pada saat investasi sudah dilaksanakan, jumlah dana tersebut sudah tertentu. Jadi tingkat upah tidak dapat berubah jauh dari alokasi tersebut. Dari dua tokoh klasik ini dapat disimpulkan ada kesan pesimisme bahwa tingkat upah hanya akan berkisar pada tingkat yang rendah. Seberapa tingkat yang rendah tersebut, yaitu tingkat yang dapat mempertahankan kehidupan. Mempertahankan mempunyai implikasi mengacu pada apa yang ada atau yang lalu. Bila yang lalu rendah, maka yang akan datang rendah. Masa dimana pendapatan ini berkembang secara kebetulan bertepatan dengan terjadinya revolusi industri yang menyerap tenaga kerja secara massal dengan upah rendah. Disamping karena rendahnya keterampilan mereka, hal ini juga karena sikap kurang begitu menghargainya pemimpin usaha terhadap peranan tenaga kerja.

### 3) Teori kelompok Neoklasik

Masih termasuk klasik karena sependapat dengan mereka tentang pentingnya kebebasan berusaha. Pembaruan yang diajukan antara lain terletak pada perubahan dalam sikap yang meninggalkan pesimisme. Inti usulan yang diajukan adalah bahwa tingkat upah dapat saja tinggal asal sesuai dengan produk marginalnya. Memang menurut mazhab ini tingkat upah cenderung untuk sama dengan nilai pasar dari produk marginal. Mazhab ini memberi kemungkinan bahwa tenaga kerja pada tingkat mikro tidak homogen. Karena tingkat upah juga tidak sama untuk semua tenaga kerja. Setiap tingkat kualitas tenaga kerja terdapat satu tingkat produk marginal dan satu tingkat upah. Kualitas tenaga kerja merupakan dasar bagi pencapaian produktifitas. Kualitas ini tergantung atas modal insani yang disikan kedalam diri tenaga kerja. Makin banyak modal yang masuk, makin tinggi kualitasnya, modal yang dimaksud terdiri atas pendidikan latihan, pengalaman kerja dan kesehatan mereka. Jalan pikiran mazhab neoklasik ini masih mendominasi jalan

pikiran sekarang. Modifikasi sana-sini sudah barang tentu ada, namun pada prinsipnya menggunakan prinsip dasar ini.

## 2. Jenis-jenis upah

Menurut Gilarso sistem upah dibagi menjadi enam, yaitu:<sup>85</sup>

### a. Upah menurut prestasi

Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja karena besarnya uah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang bisa dicapai dalam waktu tertentu.

### b. Upah waktu

Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja melakukan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan.

### c. Upah borongan

Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja.

### d. Upah premi

Upah premi adalah uang jasa khusus yang diberikan kepada karyawan karena prestasi di luar kelaziman (bekerja pada hari libur, pekerjaan yang berbahaya, dan keahlian yang istimewa).

### e. Upah bagi hasil

Bagi hasil merupakan cara yang biasa di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar kelangan itu. Misalnya karyawan diberi bagian dari keuntungan itu, bahkan kaum 28 buruh dapat diberi saham dalam perseroan terbatas (PT) tempat mereka bekerja sehingga kaum buruh ikut menjadi pemilik perusahaan.

---

<sup>85</sup> gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*.

f. Peraturan gaji pegawai negeri

Gaji pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan dua prinsip pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja.

### 3. Dasar Hukum Upah Minimum

Landasan sistem pengupahan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan penjabarannya dalam Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada tiga fungsi upah, yaitu mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mempunyai fungsi sosial, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang dan membuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Maka dari itu upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Pasal 89 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.78 Tahun 2015, Upah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>86</sup>

Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam pasal 41-50 Undang-undang no.78 Tahun 2015. Upah

---

<sup>86</sup> peraturan pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, Tentang Pengupahan, BAB IV, Pasal 1” (jakarta, 2015).

minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1-2 terdiri atas:<sup>87</sup>

- 1). Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman.
- 2). Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas:
  - a. Upah tanpa tunjangan
  - b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah minimum yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Komponen dan pelaksanaan tahap pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41.<sup>88</sup>

#### 4. Penetapan Upah Minimum

Penetapan upah minimum di Indonesia dilakukan setiap tahun yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak yaitu kebutuhan pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. Penetapan upah minimum Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.

Penetapan upah minimum dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> peraturan pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, Tentang Pengupahan, BAB IV, Pasal 41” (jakarta, 2015).

<sup>88</sup> Nanang Setyono, “Rekonstruksi Kebutuhan Hidup Layak (Khl) Melalui Koperasi Karyawan Dalam Kajian Undang–Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 178–196.

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

- U<sub>mn</sub> = Upah minimum yang akan ditetapkan  
 U<sub>mt</sub> = Upah minimum tahun berjalan  
 Inflasi = Inflasi yang dihitung dari september tahun yang lalu sampai dengan periode september berjalan  
 $\Delta PDB_t$  = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Secara umum upah cenderung ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas marginal buruh, akan tetapi produktifitas tidak selalu sama dalam segala bentuk tenaga kerja. Produktifitas akan selalu berbeda sesuai tingkat kekurangan setiap jenis buruh berkaitan dengan permintaan ke atas jenis buruh tersebut. Perbedaan kadar upah bisa disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah:

- a. Perbedaan dalam kemampuan asal, setiap individu masyarakat dilahirkan dengan kemampuan akal yang berbeda, tidak semua di antara kita yang memiliki bakat untuk menjadi bintang top atau mempunyai kecerdasan untuk menjadi dokter, akuntan atau insinyur. Hanya mereka yang mempunyai akal dan kecerdasan tinggi yang bisa bercita-cita seperti itu. Orang yang seperti ini jumlahnya tidak banyak dan penawaran ke atas orang-orang tersebut berkurang sehingga mereka menerima upah yang lebih tinggi.
- b. Perbedaan dalam kemampuan jasmani, ada sebagian pekerja yang memerlukan kemampuan jasmani seperti kecantikan dan yang lain. Oleh karena itu bagi individu yang tidak memiliki kemampuan jasmani yang diinginkan tidak akan mendapat



kesempatan bekerja seperti ini sehingga pendapatannya berbeda dengan yg mempunyai kemampuan.

- c. Perbedaan dalam sifat kemampuan dan kemahiran, sebagian pekerjaan ada yang mempunyai resiko tinggi, berbahaya dan kurang sejahtera. Oleh karena itu para pekerjaanya mendapat upah lebih dibandingkan yang lain. Hal itu disebabkan karena pekerjaan tersebut menanggung resiko dan membahayakan sehingga wajar jika pekerja yang bekerja di bidang itu mendapatkan upah yang lebih tinggi

## 5. Hubungan Upah Minimum Dengan Pengangguran

Upah Merupakan faktor pendukung bagi seorang pengangur untuk segera memperoleh pekerjaan, besar kecilnya upah yang diberikan akan memiliki pengaruh pada niat seseorang untuk bekerja.<sup>89</sup> Upah memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap tingkat pengangguran. Pengaruh positifnya yaitu dimana kenaikan tingkat upah akan menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan kenaikan harga produk. Kenaikan harga produk tersebut akan mendapatkan respon negative dari konsumen sehingga konsumen mengurangi pembelian. Kondisi tersebut menyebabkan produsen mengurangi produksi dan akan berpengaruh terhadap pengurangan yang menekan jumlah tenaga kerja pada akhirnya pengangguran akan meningkat. Sedangkan pengaruh negative disini yaitu dapat dilihat dari jumlah penawaran tenaga kerja, karena kenaikan tingkat upah akan menyebabkan penawaran kerja meningkat sehingga tingkat pengangguran berkurang.

Pengangguran disebabkan oleh upah yang berada diatas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dengan permintaan. Namun, ada satu perbedaan lain. Peraturan

---

<sup>89</sup> Juliyanti Maria Marpaung, Lapeti Sari, and Eriyati Eriyati, "Pengaruh Migrasi Masuk Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Pekanbaru Tahun 2000-2014" (Riau University, 2017).

upah minimum dan serikat pekerja mencegah perusahaan menurunkan upah meskipun penawaran pekerja berlebihan. Pernyataan ini diperkuat dengan teori Mankiw, dijelaskan bahwa upah senantiasa menyesuaikan diri demi terciptanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, Tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja telah menyesuaikan diri guna menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Efek yang paling terasa dari kebijakan penetapan upah minimum adalah tingkat upah yang semakin tinggi yang dikarenakan perusahaan harus menaati kebijakan pemerintah sehingga otomatis perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja. Teori ini menjelaskan bahwa semakin tinggi upah maka akan mengurangi tenaga kerja dan akan meningkatkan tingkat pengangguran dimana yang diminta oleh perusahaan karena besarnya biaya yang dikeluarkan dan Sebaliknya ketika upah rendah perusahaan akan menarik banyak tenaga kerja.<sup>90</sup>

## 6. Upah Minimum Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajrān* yang berarti memberi hadiah/ upah. Kata *ajrān* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala.<sup>91</sup> Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan Berdasarkan pandangan umat islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja

---

<sup>90</sup> N Gregory Mankiw, "Teori Makroekonomi Edisi Kelima," *Terjemahan*. Jakarta: Penerbit Erlangga (2003).

<sup>91</sup> Ahmad Warson Munawir, "Kamus Arab Indonesia, Cet. Ke-3," Surabaya: Pustaka Progresif (1997): 95.

dan kewajiban orang yang memperkerjakan untuk membayarnya.

Dalam Islam upah disebut juga dengan *ujrah* yang dihasilkan dari akad *Ijarah*. Menurut ulama<sup>92</sup> Hanafiyah Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi upah (*ujrah*) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Dalam al-Quran upah didefinisikan secara menyeluruh dalam sebuah ayat:

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ  
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S, Az-Zumar [39] :35).

Maksudnya Allah menghalalkan upah, sebab upah (tsaman) adalah konpensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan suatu perbuatan buruk yang akan mendapat

ancaman siksa dari Allah. Dan Nabi mengatakan, siapa yang akan mempekerjakan orang harus memberitahukan upahnya. Dalam hal ini upah yang dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak yang telah disepakati. Apabila masa kontrak kerja telah habis maka akan dibentuk kontrak kerja baru dengan kesepakatan yang baru sesuai dengan kondisi pada saat itu.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Sri Dewi Yusuf, “Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam,” *Al-Ulum* 10, no. 2 (2010): 309–324.

Menurut Afzarul rahman terhadap penetapan upah minimum adalah upah atau gaji ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang. Dengan demikian upah tidak bergantung pada faktor penawaran dan permintaan tenaga kerja seperti yang ada pada sistem ekonomi modern. Negara sebagai wakil Allah di muka bumi diharapkan dapat melakukan pemerataan rezeki terhadap anggota masyarakatnya dan tidak akan pernah membolehkan pemberian upah yang berada dibawah tingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Diriwayatkan Rasulullah s.a.w pernah bersabda: *“berilah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak sebagaimana kebiasaannya danberilah mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuan”*

Hadis tersebut jelas menganjurkan agar upah para pekerja harus cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka melalui taraf hidup pada saat itu. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang telah ada, upah atau gaji ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang.

Adapun Teori Distribusi menurut Ibnu Khaldun yakni, Harga suatu produk terdiri dari tiga unsur : gaji, laba, dan pajak. Gaji merupakan nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang. Namun harga tenaga kerja ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran : “keahlian dan tenaga kerja pun mahal di kota-kota dengan peradaban yang melimpah. Ada tiga alasan yaitu: **Pertama**, Karena besarnya kebutuhan, yang ditimbulkan oleh meratanya hidup dalam tempat yang demikian dan padatnya penduduk.

**Kedua**, Karena gampangnya orang mencari penghidupan dan banyaknya bahan makanan di kota-kota menyebabkan tukang-tukang (buruh) kurang mau menerima bayaran rendah bagi pekerjaan dan pelayannannya.

**Ketiga**, karena banyaknya orang kaya yang memiliki banyak uang untuk dihaburkan dan orang seperti ini banyak kebutuhannya sehingga mereka memerlukan pelayanan orang lain, yang berakibat timbulnya persaingan dalam mendapatkan jasa pelayanan sehingga mereka bersedia membayar lebih dari pekerjaannya.

Syarat sah dan tidaknya transaksi *ijarah* tersebut adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang ajir untuk memberikan jasa yang diharamkan. Ijarah adalah transaksi terhadap jasa tertentu dengan suatu kompensasi. Syarat tercapainya transaksi ijarah adalah kelayakan orang yang melakukan akad, serta syarat sah dan tidaknya adalah ridha kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan upahnya harus jelas. Islam ada untuk menawarkan sistem ekonomi yang adil dan bermatabat, salah satu sistem ekonomi Islam adalah sistem pekerjaan yang di dalamnya terdapat hubungan majikan-pekerja dan sistem pengupahan. Islam menempatkan majikan dan pekerja dalam kedudukan setara, keduanya saling membutuhkan. Hubungan ini disebut kontrak ijarah yang memuat berbagai ketentuan kerja yang berlaku antara buruh, majikan dan pihak ke 3. Tujuan dasar ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, untuk menuju kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat (*falah*). Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Islam sebagai solusi yang didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan pihak manapun sesuai dengan ajaran Islam.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Yono Yono and Amie Amelia, "Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 121–137.

Tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Islam ada untuk menawarkan sistem ekonomi yang adil dan bermatabat, salah satu sistem ekonomi Islam adalah sistem pekerjaan yang di dalamnya terdapat hubungan majikan-pekerja dan sistem pengupahan. Islam menempatkan majikan dan pekerja dalam kedudukan setara, keduanya saling membutuhkan. Menurut sunnatullah manusia memiliki kebutuhan pokok yang harus dipenuhi seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan papan. Sehingga dalam menentukan tingkat upah harus berpedoman pada kebutuhan pokok tersebut. Adapun faktor-faktor penentu tingkat upah adalah:<sup>94</sup>

- a. Faktor obyektif; berdasarkan faktor ini, upah ditentukan berdasarkan kontribusi atau produktifitas tenaga kerja. Manusia tidaklah seperti faktor produksi yang lain sehingga ia tidak dapat diperlakukan seperti barang modal.
- b. Faktor subyektif; dengan adanya factor ini akan menyebabkan tingkat upah yang Islami tidak berada pada satu titik tertentu melainkan pada satu kisaran tertentu.

Atas dasar faktor-faktor tersebut diatas maka dalam sejarah Islam penentuan gaji untuk pegawai pemerintahan Islam ditentukan sebagai berikut:

- a. Upah pada masa Rasulullah; Rasulullah telah meletakkan beberapa prinsip dasar untuk menentukan upah pegawai pemerintah Islam sebagaimana yang dijelaskan sebuah hadits. Hadits tersebut adalah; “Bagi seorang pegawai negeri, jika ia belum menikah sebaiknya ia menikah, jika ia tidak memiliki pelayan, hendaklah ia memiliki

---

<sup>94</sup> Murtadho Ridwan, “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam,” *Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 241–257.

pelayan, jika ia tidak memiliki tempat tinggal untuk ditempati, maka ia boleh membangun sebuah rumah dan orang-orang yang melampaui batas-batas ini, maka ia adalah perebut tahta (pencuri).”(HR. Abu Dawud).

- b. Upah pada masa Khalifah; Umar bin Khatab telah menjelaskan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan distribusi bantuan atau pembayaran tunjangan. Perbedaan upah sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pada tahun pertama hijrah, para sahabat yang ikut berperang di perang Badar dan Uhud mendapat tunjangan terendah 200 Dirham dan tunjangan tertinggi 2000 Dirham. Pada masa kekhalifahannya, Umar bin Khattab menentukan upah untuk para pegawai pemerintah berdasarkan keadaan sebuah kota dan kebutuhan pribadi mereka.

Tindakan Umar ini dapat kita ambil contoh untuk menentukan standar gaji menurut kebutuhan pokok masyarakat karena di zaman sekarang terdapat kebutuhan tambahan seperti kebutuhan transportasi, pendidikan, kesehatan dan yang lain sehingga gaji atau upah hendaklah sesuai dengan faktor-faktor berkaitan seperti inflasi, biaya kesehatan, dampak pengangguran dan yang lainnya.

Jika upah minimum tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja, maka pekerja harus diberi zakat. Pendapat ini banyak didukung oleh para ahli ekonomi Islam, ini karena jika upah atau gaji pekerja tidak mencukupi kebutuhan pekerja dan keluarganya, maka pekerja tersebut dikategorikan sebagai orang miskin dan berhak atas dana zakat. Namun, harus ada mekanisme yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan pekerja. Jadi, secara garis besar harus ada standar upah minimum yang diberikan kepada para pekerja. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep upah dalam Islam harus adil dan layak. Dimana adil dalam konsep upah ini memiliki

dua makna, *pertama*; adil bermakna jelas dan transparan. Adil dengan arti ini bermaksud; waktu pembayaran upah harus jelas. Keterlambatan membayar upah dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah pekerja termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi SAW di hari kiamat nanti. *Kedua*, adil bermakna proporsional, maksudnya; pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Konteks ini yang oleh ahli ekonomi Barat disebut dengan konsep *equal pay for equal job*.<sup>95</sup>

Sedangkan konsep upah dalam Islam harus layak, maka maksudnya adalah kelayakan upah yang diterima oleh pekerja harus dilihat dari tiga aspek, yaitu; papan, pangan dan sandang. Artinya hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan formal, tetapi pekerja sudah dianggap sebagai keluarga majikan. Konsep inilah yang membedakan antara konsep upah menurut ekonomi barat dengan konsep upah menurut ekonomi Islam. Layak dalam konsep upah pekerja juga dapat diartikan dengan sesuai pasaran. Maksudnya, janganlah seseorang itu merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dengan kata lain, janganlah mempekerjakan seseorang dengan upah yang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Ini karena upah dalam Islam berkaitan dengan moral, pemberian upah dibawah batas minimum berarti bertentang dengan moral sehingga dimensi akhirat tidak akan diperoleh majikan yang memberi upah dibawah standar minimum.<sup>96</sup>

#### **D. Kerangka Berpikir**

Kerangka pikir merupakan gambaran umum hubungan antar variabel, berdasarkan latar belakang yang sudah

---

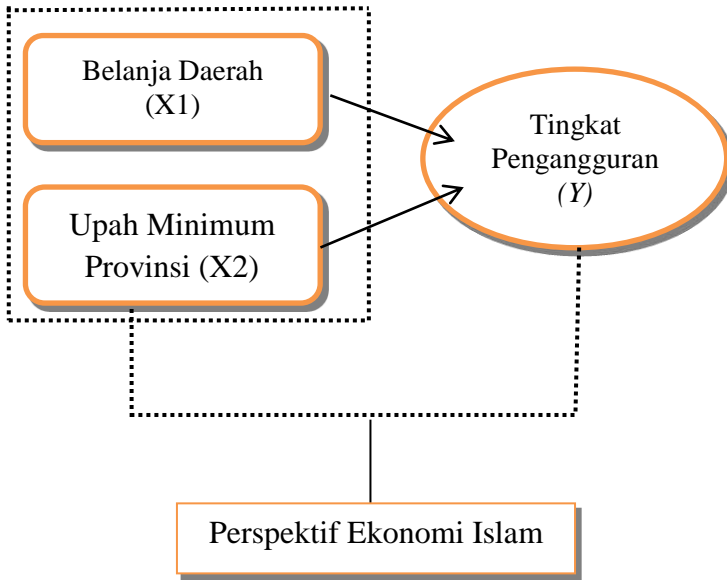
<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> Ibid.



dipaparkan maka kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka berpikir**



Keterangan :

→ = Uji Parsial

..... = Uji Keseluruhan

**E. Hipotesis**

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>97</sup>

<sup>97</sup> P Dr, “Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” CV. Alfabeta, Bandung (2008): 25.

Secara umum hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$H_0$  : Variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y

$H_a$  : Variabel X memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y Hipotesis dalam penelitian ini berfungsi sebagai dugaan sementara atas rumusan masalah dalam penelitian.

- a. Diduga Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran di provinsi Lampung.
- b. Diduga Upah Minimum berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran di provinsi Lampung.
- c. Diduga Belanja Daerah dan Upah Minimum secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran di provinsi Lampung.

Adapun berdasarkan masalah pokok dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara yang selanjutnya akan diuji sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung.**

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Komponen belanja daerah atau pengeluaran daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam Mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Selly Nursafitri dan Ana Toni Roby Candra Yhuda (2020) dengan penelitian berjudul “Instrumen Moneter Dan

Belanja Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pengangguran Terbuka” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur, Variabel yang memiliki pengaruh paling besar dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka adalah variabel belanja daerah.

Hasil penelitian dari Rizaldi Kaharudin, Anderson G. Kumenaung, Audie O. Niode (2019) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Pengeluaran pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017)” Belanja Pemerintah berpengaruh Negatif terhadap Pengangguran. ini ditunjukkan oleh koefisien regresi jumlah Pengangguran yaitu sebesar 0,31. Jika Belanja Pemerintah meningkat sebesar 1 % maka Pengangguran akan turun sebesar 0,31 % . Hal ini sesuai dengan teori bahwa apabila belanja pemerintah digunakan untuk alokasi belanja barang dan jasa maka akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru dan menekan jumlah pengangguran di daerah itu.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya diatas, maka dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut:

**Ha<sub>1</sub>**: Belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat engangguran di provinsi Lampung.

## **2. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung.**

Upah yang layak adalah upah yang memenuhi standar pengupahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan mendapatkan upah yang layak maka tenaga kerja akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, mengenai upah minimum yang diatur dalam pasal 41 dan

42. Dan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong semangat kerja dan produktivitas tenaga kerja

Dalam penelitian yang dilakukan Yarlina Yacob Dan Maulidiah Firdayanti (2019) dengan penelitiannya berjudul “Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Upah Minimum menunjukkan pengaruh yang signifikan dan berdampak positif terhadap pengangguran di kabupaten/kota provinsi kalimantan barat.

Hasil penelitian Effendyy dan Rully Sutansyah (2019) dengan peneliian berjudul Pengaruh Upah Minimum Terhadap pengurangan Pengangguran Terbuka Di Indonesia dan didapatkan hasil upah minimum sebagai variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap penurunan tingkat pengangguran, hubungan variabel upah minimum dengan pengangguran bersifat positif, artinya apabila upah minimum meningkat maka pengangguran pun akan meningkat.

Dari hasil penelitian di atas maka dalam penelitian ini hiposisnyya adalah sebagai berikut:

**Ha<sub>2</sub>**: Upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi Lampung.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan terkait tujuan penelitian tentang **Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam**, sebagai berikut:

1. Hasil uji signifikan parsial (Uji T) pada variable Belanja Daerah memperoleh nilai coefficient sebesar  $-0.42696$ , dan nilai probability sebesar  $0.0473$  atau ( $<0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2021.
2. Hasil uji signifikan parsial (Uji T) pada variable Upah Minimum memperoleh nilai coefficient sebesar  $0.041680$ , dan nilai probability sebesar  $0.8044$  atau ( $>0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2021.
3. Dalam penelitian ini bila ditinjau menurut perspektif ekonomi islam belanja daerah sepenuhnya terealisasi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Ini dapat dilihat realisasi belanja daerah Provinsi Lampung pada tahun 2011-2021 masih bersifat fluktuatif pada segi pengeluaran. Namun di lihat dengan peningkatan pengangguran, belanja daerah dapat berperan aktif dalam menurunkan tingkat pengangguran. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung maka belanja daerah/ pengeluaran pemerintah lebih difokuskan pada program atau kegiatan yang mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian termasuk masalah pengangguran.

Jika dilihat dari ekonomi islam dalam pemberian upah yang layak maka dapat dilihat di provinsi Lampung tahun 2011-2021 peningkatan upah minimum dapat menyebabkan masalah pengangguran meningkat hal tersebut karena faktor dari penetapan upah minimum provinsi Lampung belum sesuai dengan yang dianjurkan dalam ekonomi islam yakni upah para pekerja harus cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Dalam islam juga menjelaskan bawasannya tingkat perekonomian yang baik apabila negara mampu mengelola sumberdaya yang ada secara baik.

## **B. Saran**

Dari berbagai kesimpulan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah Provinsi Lampung**

Agar menjadi bahan dasar pertimbangan pemerintah provinsi Lampung untuk mengambil kebijakan dari realisasi belanja daerah dalam menurunkan angka pengangguran diharapkan

pengeluaran pemerintah daerah dari tahun ketahun tetap stabil dan ditunjukan/diarahan sesuai dan memiliki manfaat bersama sesuai perintah Allah SWT dan tentunya kondisi ini harus dipertahankan agar pengangguran tidak meningkat. Salah satunya dengan mendukung serta meningkatkan lapangan usaha dengan nilai tertinggi, lapangan usaha dengan nilai tertinggi di provinsi Lampung ialah pada Pertanian, Kehutanan dan Perikanan membutuhkan bantuan pemerintah daerah agar ketiga sektor tersebut dapat meningkat sehingga dapat menyerap tenaga kerja, serta peningkatan inrakstruktur/ fasilitas umum yang memadai untuk masyarakat agar mudah mengakses segala bentuk kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falah* yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahat bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya kenaikan upah minimum yang semakin meningkat dan pengangguran pun mengalami kenaikan sebaiknya pemerintah memiliki sebuah upaya yang harus dilakukan dalam menangani permasalahan pengangguran, melalui program kebijakan pemberdayaan penduduk dan perluasan lapangan kerja dengan mendukung UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), serta kegiatan yang memotivasi para pencari kerja untuk berkembang.

2. Bagi Peneliti/pembaca

- a. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menambah wawasan terhadap permasalahan serupa yang ada di lingkungan sekitar.
- b. Bagi Pembaca, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi referensi penelitian berikutnya dengan pembahasan serupa. Penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang penulis dapatkan didalam perkuliahan.